

**RELASI NEGARA DENGAN *UMMAH* MENURUT ALI SYARIATI
DALAM PERSPEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

ANDI IRDAYANTI

30600114072

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI IRDAYANTI
Nim : 30600114072
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan 15 Mei 1996
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Fakultas : Ushuluddin Filsafat dan Politik
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Politik
Alamat : Bumi Samata Permai Blok E1 no 2
Judul : Relasi Negara danm *Ummah* Menurut Ali Syariati dalam
Perspekif Kebangsaan Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 10 November 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
ANDI IRDAYANYI
NIM: 30600114072

PENGESAHAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi yang berjudul “RELASI NEGARA DENGAN *UMMAH* MENURUT ALI SYARIATI DALAM PERSPEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA ” disusun oleh Andi Irdyanti, Nim: 30600114072, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar telah diuji dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 20 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata Gowa, 18 September 2018

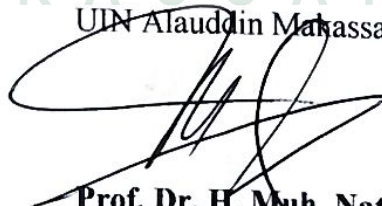
DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Tasmin, M. Ag.
Sekretaris : Ismah Tita Ruslin, S.IP., M.Si.
Munaqisy I : Dr. Mahmuddin, M. Ag.
Munaqisy II : Ismah Tita Ruslin, S.IP., M.Si.
Pembimbing I : Dr. Abdullah, M.Ag.
Pembimbing II : Nur Aliyah Zainal, S.IP., MA.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar.



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.

NIP: 1959074 1 98903 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Politik Islam menurut Ali Syariati” dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta WR. I, WR. II, WR. III, dan WR. IV.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Natsir, MA, selaku Dekan Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, WD. I sekaligus ketua sidang ujian hasil skripsi penulis, WD. II sekaligus penguji hasil skripsi penulis. Dan WD. III sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu luang, saran dan bimbingan serta pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Syahrir Karim, M.Si.,Ph.D selaku ketua jurusan Ilmu Politik.

4. Ibu Isma Tita Ruslin, S.IP.,M.Si, selaku sekretaris jurusan Ilmu Politik Uin Alauddin Makassar sekaligus dosen penasihat akademik yang menjadi orang tua penulis di kampus dan juga sebagai penguji hasil skripsi penulis.
5. Ibu Nur Aliyah Zainal S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu luangnya, saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Syarifuddi Jurdi, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Politik periode 2009-2018 sekaligus penulis buku-buku yang menjadi salah satu referensi penulis.
7. Kepada seluruh dosen Ilmu politik yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dalam jurusan Ilmu Politik.
8. Segenap Staf Akademik dan Perpustakaan Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas bantuan yang telah diberikan.
9. Orang Tuaku Tercinta, Andi Arifuddin.S dan Nurbeda atas segenap kasih sayang, semangat, dorongan moral dan doa restunya. Dan kedua saudariku tersayang Andi Andriani S.Pd dan Andi Sisi Febriyanati atas bantuan, dukungan, semangat dan doanya.
10. Terkhusus untuk Idris, S.M yang selalu mendampingi dan memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada sahabatku Lilis, Widya, Amran, Saldi, Ilham, Yusuf, Cua, terutama Deswina, Dian, dan Eva yang selalu membantu dan menemani serta memberi dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Saudara Taha yang telah memberikan beberapa referensi yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat dan sahabatwati dari PMII dan Kopri cab. Gowa yang ikut memberi dukungan atas penulisan Skripsi ini.
14. Segenap teman-teman jurusan Ilmu Politik khususnya teman-teman kelompok 3/4 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas semuanya.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan partisipasinya terhadap penyelesaian skripsi ini.

Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 16 juni 2018
Penulis

Andi Irdyanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Tinjauan Karya Terdahulu	10
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	
A. Tinjauan Teori.....	15
B. Kerangka Konseptual.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Objek Kajian	22
C. Sumber Data.....	22
D. Metode Pengumpulan Data.....	23
E. Metode Analisa Data	23
F. Sistematika Penuisan.....	23
BAB IV HASIL	
A. Konsep Negara dan <i>Ummah</i> dalam Islam.....	25
1. Negara dalam Islam.....	28
2. <i>Ummah</i> dalam Islam	32
B. Relasi Negara dan <i>Ummah</i> menurut Ali Syariati.....	34
1. Negara	39
2. <i>Ummah</i>	44
3. Relasi <i>Ummah</i> dengan Negara Ideal	51
C. Relasi <i>Ummah</i> dan Negara menurut Ali Syariati dalam Perspektif Kebangsaan Indonesia	
1. Konsep Negara dan Pancasila	55
2. Konsep <i>Ummah</i> dan Pluralisme	65
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Nama : Andi Irdayanti
Nim : 30600114072
Judul : Relasi Negara dengan *Ummah* Menurut Ali Syariati
dalam Perspektif Kebangsaan Indonesia

Penelitian ini tentang Relasi Negara dan *Ummah* menurut Ali Syariati dalam perspektif kebangsaan Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi Negara dan *Ummah* Islam dan Ali Syariati, dan bagaimana relasi dengan konsep kebangsaan Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan analisis history. Data yang digunakan dari penelitian ini terdiri dari dua sumber data yakni sumber data primer yang berasal dari karya-karya Ali Syariati dan data sekunder yang berasal dari karya-karya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini berisi pemikiran Ali Syariati yang dipengaruhi oleh ayahnya dan lingkungan sosial dimana penguasa yang tidak pro terhadap rakyat kemudian melahirkan konsep *Qaum* yang biasa disebut dengan negara kolektif yang berlandaskan atas al-Qur'an bertujuan untuk menciptakan masyarakat sempurna dan negara tanpa adanya interpretasi kelas serta konsep *ummah* yang mengatur masyarakat agar terus bergerak dinamis, saling bahu membahu agar mencapai tujuan yang diinginkan yaitu "kemajuan". Konsep *ummah* sendiri membutuhkan manusia ideal atau manusia sempurna, manusia ideal ini kemudian dijadikan dasar untuk melahirkan seorang pemimpin yang Ali Syariati menyebutnya "*Imam*" yang mampu membangun masyarakat dengan menjalankan dua peran ganda yaitu pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin politik. Konsep ini kemudian memiliki relasi dengan konsep Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan pluralisme sebagai realisasi Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan simbol bangsa Indonesia. Sekaligus membuktikan bahwa Pancasila tidak menyeleweng dari ajaran Islam.

Demi mengatasi kestatisan pemikiran Islam perlu diberi rangsangan-rangsangan berupa objek-objek baru dan karya-karya luar yang akan merangsang pemikiran baru. bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pemikiran Ali Syariati hendaknya mendalami dengan pembatasan yang lebih spesifik. apa yang tertera dalam penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan agar menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baru dan inovatif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama sebagaimana yang dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen Ilahiyah untuk memahami dunia. Dibandingkan dengan agama lain, Islam sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini, alasan utamanya adalah terletak pada ciri Islam yang paling menonjol yaitu sifat yang hadir dimana-mana. Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa dimana-mana keberadaan Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.

Pandangan itu telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Penumbuhannya dinyatakan dalam syari'at, bahkan sebagian kalangan muslim melangkah lebih jauh dari itu. Mereka menekankan bahwa Islam merupakan totalitas padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan.¹

Beragam pendapat para pengkaji politik Islam terhadap pandangan agama Islam tentang konsepsi dasar dari teori politiknya, mengingat sejarah politik Islam juga menyisahkan pertanyaan etis. Sejak Nabi Muhammad Saw melakukan dakwah untuk pertama kalinya, yang kemudian sudah menjadi inspirasi bagi kaum muslimin di belahan dunia ini dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan Nabi Muhammad Saw.²

¹Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara (Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia)* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 7.

²Muhammad Nasrul Fani, "Pemikiran Politik Islam (studi pemikiran Abdul Rahman Wahid dan Nurcholas Majid)" (Jurnal *UIN Sunan Kalijaga II*, No. 1, 2009), h. 2.

Baik di era Rasulullah maupun setelahnya, umat Islam dalam sejarah yang gemilang selalu berada dalam kehidupan yang nyaman dan tenang, walaupun mereka hidup bersama komunitas yang tidak seagama seperti Nasrani dan Yahudi. Seperti yang diketahui Rasulullah Saw adalah Nabi-penguasa hampir seluruh semenanjung Arabia, namun beliau tidak pernah menyebut dirinya sebagai penguasa. Yang pada saat itu istilah negara Islam (*daulat al-Islam*) belum dikenal.³

Pandangan dalam Islam melihat politik adalah konsep yang menyeluruh, komprehensif, integral serta bukan hanya masalah kekuasaan belaka. Islam memandang politik sebagai sebuah “cara” dan bukan “tujuan”. Konsep ini didasari oleh aqidah yang kokoh dan berpegangan pada *manhaj* yang pernah ditempuh oleh Rasul, *shahaba*, dan para *tabi’in*. Berpijak pada pengertian yang benar, maka politik (*syiasah*) tidak akan lepas dari *da’wah*, ibarat dua sisi mata uang yang jika dilepas salah satunya maka koin tidak lagi berharga. Sehingga hubungan antara *syiasah* dan *da’wah* adalah hubungan antara cara dan sasaran. Dalam kerangka pandang ini, perjuangan Islam harus mengambil pola struktural. Karena alat pengambil kebijakan berangkat dari logika politik. Terlebih ketika mengingat pesan Imam Ali ra, bahwa “kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir”.⁴

Secara umum, negara tergantung pada kekuatan pendapat penduduknya yang dalam hal kerjasama dan saling menolong, adalah seperti organ manusia. Ini hanya tercapai jika para anggotanya memiliki pendapat yang sama (hasil musyawarah), dimana tingkat persatuan spritual semacam ini menentukan kemajuan dan kemunduran negara. Kewajiban pemimpin adalah memikirkan

³Ida Zahrah Adiba, “Islam Muslim Dan Perilaku Politik(*Konsep Nation State di Dunia Islam Kontemporer*)” *Jurnal Darussalam* 9, No.4, November 2008, h. 135.

⁴<https://zakigerilyawan.wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 april 2018.

keadaan rakyatnya dan mengabdikan diri untuk menjaga keadilan, artinya secara khusus tugas pemimpin negara adalah menjaga keseimbangan antara kelompok-kelompok sosial, dan menghindari dominasi antara satu kelompok dan kelompok lainnya.⁵ Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S An-Nahl/16:90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁶

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah terus menerus memerintahkan siapapun di antara hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam sikap ucapan dan tindakan walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat *ihsan* yakni yang lebih utama dari keadilan dan Dia melarang semua perbuatan keji yang agak dicelah oleh agama dan akal sehat dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran⁷

⁵Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terjemahan dari *The History of Islamic Political Thought: from the Prophet to the Present* oleh Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati (Jakarta: PT.Searambi Ilmu Semesta, 2006), h. 287.

⁶Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the Reference Q* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 415.

⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 697.

Selain itu juga telah disampaikan dalam dalam Q.S At-Taubah/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Swt selalu menyerukan perbuatan *ma'ruf* dan melarang perbuatan yang mungkar, dan Allah menjanjikan janji yang pasti kepada orang-orang yang mantap imannya. Kemudian menghimpun orang-orang yang mukmin untuk melahirkan tolong menolong yang diajarkan oleh Islam. Yang berbeda dengan kaum munafikin yang kesatuan antara mereka lahir dari sifat-sifat yang buruk.⁹

Agama dan negara bukanlah saudara kembar atau satu sama lain saling bekerja sama. Negara bukanlah perpanjangan dari Islam seperti yang dikatakan oleh Al-Gazali¹⁰ tetapi sebagai instrumen dan pantulan dari nilai-nilai moral dan spiritual serta prinsip-prinsip yang disebut dalam Islam. Kemudian menurut Azyumardi Azra, ada dua pandangan besar tentang hubungan Islam dan politik. Yaitu Pertama, melihat politik sebagai integral dari agama, Dalam hal ini Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan *siyasah* (politik) kemudian

⁸Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 291.

⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 164.

¹⁰Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 29.

muslimin menerjemahkannya untuk terjun langsung ke dunia politik praktis. Kedua, pendapat bahwa politik memang bagian dari agama (Islam), tetapi keduanya ada perbedaan karakter yang sangat esensial. Islam bersifat Ilahiyah berasal dari wahyu, sakral dan suci. Sedangkan politik berkenang dengan kehidupan profan, kehidupan duniawi yang kadang-kadang melibatkan trik-trik yang manipulatif.¹¹

Selain untuk menghindari akan terjadinya kekacauan, umat Islam juga membutuhkan negara untuk dapat merealisasikan ajaran Islam itu sendiri. Dari segi figur ulama dan cendekiawan, Ali Syariati adalah salah seorang tokoh yang mengusung berdirinya negara yang Islami atau lebih tepatnya negara dengan pemerintah Islam. Ini terlihat dalam pembebasan dalam negara Iran dari rezim Syah Pahlevi. Sebagai tokoh yang fenomenal dan kontroversial, emosional, dan humanis religius, pemikiran Ali Syariati banyak dimensi dan ditafsirkan bermacam-macam. Doktrin Syi'ah yang melekat dan membekas pada diri Ali Syariati terintegrasi dengan realitas sosial Iran yang diwarnai dengan pertarungan ideologis, dengan demikian peta pertarungan Ali Syariati cenderung bersifat radikal.¹²

Kecenderungan radikalisme Ali Syariati itu adalah sikap yang dipilih secara sadar dan merupakan refleksi dari sikap kritisnya. Menurut teori Paulo Freire, sikap tersebut muncul sebagai akibat keterlibatan seseorang dan mengubah satu realitas sosial tertindas dan pengungkapan terhadap ketidak puasan sosial.¹³ Seorang pemikir besar yang lahir di tengah tekanan sosial politik yang disaksikan disekitar kehidupannya.

¹¹ Azyumardi Azra, *Islam substantif (Agar Umat Tidak Jadi Buih)* (Bandung: Mizan, 2000), h.144.

¹² El Suhaemi, "Pemerintah Islam menurut Ali Syariati", *Jurnal Politik dan Agama* 5, No.2, Agustus 2012, h.25.

¹³ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 5.

Pemahaman Islam yang ditawarkan Ali Syariati berbeda dengan pemahaman *mainstream* saat itu. Islam yang dipahami banyak orang dimasa Syariati adalah Islam yang hanya sebatas agama ritual dan fiqh yang tidak menjangkau persoalan-persoalan politik dan sosial kemasyarakatan. Islam hanyalah sekumpulan dogma untuk mengatur bagaimana beribadah tetapi tidak menyentuh sama sekali cara yang paling efektif untuk menegakkan keadilan,

strategi melawan kezaliman atau petunjuk untuk membela kaum tertindas (*mustad'afin*). Dalam istilah al- Qur'an, *istid'af* bukan berarti "kelemahan atau keputusan". Itu merupakan kata jadian yang sama dengan *istibdâd* (despotisme), *isti'mâr* (kolonialisme), *istismâr* (eksploitasi), dan seterusnya. Dalam kenyatannya, yang terakhir itu merupakan bentuk-bentuk *istid'af* (penindasan) yang telah terjadi diberbagai masa sejarah. Setiap kali rakyat dibiarkan lemah secara ekonomis (eksploitasi), politis (despotisme), nasionalis (kolonialisme), dan kultural (pelumpuhan), entah didalam satu bidang ini atau gabungan beberapa diantaranya, maka terjadilah *istid'af* dan korban-korbannya dinamakan *mustad'afin* (yang tertindas).¹⁴

Islam yang demikian itu dalam banyak kesempatan sangat menguntungkan pihak penguasa yang berbuat sewenang-wenang dan mengumbar ketidakadilan, karena ia bisa berlindung dibalik dogma-dogma yang telah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi kepentingannya.

Saat ajaran Islam yang ideal, mulia dan paripurna, terkikis oleh sebagian ambisi orang dan digantikan dengan kezaliman, penindasan tentu membuat gerah parah cendekiawan yang masih memiliki mata hati dan kecerdasan spiritual untuk mendobrak tradisi status quo tersebut dan menggantikan dengan nilai-nilai hidup penuh kebaikan dan kebijaksanaan.

¹⁴Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Oleh Bahrul Ulum (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 12.

Lebih lanjut, Ali Syariati memberikan gambaran tentang Islam pembebasan adalah tidak cukup dengan menyatakan kita harus kembali kepada Islam. Kita harus menspesifikasi Islam mana yang kita maksudkan. Islam Abu Zar atau Islam Marwan bin Affan, sang penguasa. Keduanya disebut Islam, walaupun sebenarnya terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Satunya adalah Islam kekhalifahan, istana dan penguasa. Sedangkan lainnya adalah Islam rakyat, mereka yang dieksploitasi dan miskin. Selanjutnya, tidak cukup syah dengan sekedar berkata, bahwa orang harus mempunyai kepedulian (*concern*) kepada kaum miskin dan tertindas. Khalifah yang korup juga berkata demikian. Islam yang benar lebih dari sekedar kepedulian. Islam yang benar memrintahkan kaum beriman berjuang untuk keadilan, Persamaan dan penghapusan kemiskinan.¹⁵

Ali Syariati adalah sosok pemikir yang senantiasa menerapkan pola berfikir kritis dan inovatif sebagai langkah awal membentuk perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, kehidupan ditengah gejolak politik yang mengedepankan kepuasan pribadi penguasa dan melupakan kesejahteraan pada rakyat, telah mendorong Ali Syariati menjadi figur pahlawan bagi kaum yang lemah untuk berani mengatakan tdk pada pemimpin yang zalim.¹⁶

Ada penekanan pada pikiran-pikiran Syariati yang tersebar di hampir seluruh karyanya bahwa revolusi merupakan jalan pemecahan problem-problem kemanusiaan Yang sering digambarkan sebagai muncul dari pertentangan kelas, yang dimana Syariati cenderung mengidentifikasi kelas yang pertama sebagai kelompok manusia yang jahat dan yang lainnya sebagai kelompok manusia yang baik. Meskipun Al-Quran tidak menegaskan bahwa ekonomi satu-satunya

¹⁵Azyumardi Azra, *Pergolakan Islam Politik: Dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996) hal. 77.

¹⁶Ernita Dewi, "Pemikiran Filosofi Ali Syariati", *Jurnal Substantia* 14, No.2, Oktober 2012, h. 232.

konteks, namun harus mengakui bahwa orang-orang tertindas punya akses lebih baik terhadap kebaikan.¹⁷

Menurut Ali Syariati kaum intelektual merupakan kaum eksponen riil dari Islam yang rasional dan dinamis, dan tugas utama mereka adalah untuk memperkenalkan suatu pencerahan dan reformasi Islam. Oleh sebab itu betapa pentingnya kaum intelektual muslim menghubungkan dirinya dengan massa, menentang kaum reaksioner dan membangkitkan Islam sebagai agama jihad yang menentang penindasan dan menegakkan keadilan. Ali Syariati berkeyakinan pemerintah kaum intelektual merupakan satu-satunya pilihan yang bisa di terima.¹⁸

Berdasarkan wacana dari pemikiran Ali Syariati yang mempunyai pemikiran keIslaman yang revolusioner, yang berbeda dengan pemikir Islam mainstream. segmen pemikiran ini yang disebut banyak pihak menjadi faktor penting yang mampu menggugah pemikiran para kaum muda Iran yang berorientasi Islam untuk bangkit melawan rezim Syah, Ia menginginkan sebuah peradaban Islam yang hendak dibangunnya yang didasari oleh gerakan-gerakan yang diikutinya sejak gerakan revolusi sampai kematiannya, yang kemudian didasari oleh prinsip-prinsip dari Islam.

Pemikiran ini kemudian diadopsi oleh para generasi diberbagai negara, tak terkecuali di Indonesia, pemikiran Ali Syariati yang dipandang berani dalam menggulingkan pemerintahan melalui ide-ide yang dicetuskannya, mampu menggerakkan para kaum muda untuk melawan penguasa yang zalim. Negara Indonesia yang notabennya berpenduduk mayoritas Islam memiliki konsep

¹⁷Halidar Bagis, *Ali Syari'ati: seorang Marxis yang AntiMarxisme dan Seorang Syi'i yang Sunni* pengantar dalam *Ali Syaria, Ummah dan Imamah* (Cet.III; Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2014), h. 13.

¹⁸El Suhaemi, "Pemerintah Islam menurut Ali Syariati", *Jurnal Politik dan Agama* 5, No.2, Agustus 2012, h. 29.

kebangsaan sendiri, yang kemudian menjadi simbol dan pegangan bagi masyarakat untuk hidup rukun di Indonesia. Namun Konsep ini memiliki kemiripan atau relasi dengan ide atau pemikiran Ali Syariat.

Berangkat dari latar belakang pemikiran Ali Syariat yang melawan rezim penguasa dan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang membuat gerakan revolusi, namun tetap berlandaskan syariat Islam, dan konsep kebangsaan Indonesia yang memiliki kemiripan dengan konsep pemikiran Ali Syariat, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Ali Syariat, namun karena pemikiran Ali Syariat yang multidimensi penulis akan fokus pada pembahasan tentang relasi negara dan *ummah* menurut Ali Syariat dalam perspektif kebangsaan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep negara dan *ummah* dalam Islam ?
2. Bagaimana relasi negara dengan *ummah* menurut Ali Syariat ?
3. Bagaimana relasi *ummah* dengan negara menurut Ali Syariat dalam perspektif kebangsaan Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan mafaat sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

- a. Melihat bagaimana konsep *ummah* dan negara yang terdapat dalam Islam,
- b. Melihat relasi *ummah* dengan negara menurut Ali Syariat, dan
- c. Melihat relasi pemikiran Ali Syariat dalam konteks kebangsaan di Indonesia.

2. *Manfaat Penelitian*

Adapun manfaat penelitian ini ialah :

a. *Manfaat akademik*

1. Sebagai partisipasi penulis dalam rangka ikut melestarikan pemikiran tokoh filosof Islam kontemporer khususnya Ali Syariati.
2. Memberi kontribusi pemikiran baru tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik Islam

a. *Manfaat praktis*

1. Kegunaan praktis yakni penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi ummat Islam untuk memahami dan lebih mengerti tentang nilai-nilai Pancasila dan pluralisme yang terkandung dalam konsep *ummah* dan negara yang seperti yang diinginkan oleh Ali Syariati.
2. Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan teori-teori keilmuan khususnya pada kajian ilmu politik.

D. *Tinjauan Karya Terdahulu*

Tinjauan pustaka ini diambil dari beberapa jurnal/tulisan/skripsi tentang konsep pemikiran Ali Syariati dan pemikiran tentang politik Islam dalam berbagai bentuk pemikirannya, jurnal/tulisan/skripsi ada yang bersinggungan langsung dan tidak langsung terhadap tema penelitian. Namun memiliki sinkronisasi terhadap tema yang diangkat oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Jurnal tahun 2011, Mashadi, IAIN Sultan Amai Gorontalo, “Pemikiran dan perjuangan Ali Syariati”, didalamnya membahas tentang pemikiran Ali

Syariati yang berpendirian bahwa Islam mempunyai sifat yang sangat prinsipil dan sangat rasional, oleh karena itu Islam harus dipandang sebagai Mazhab Ideologi, bukan suatu kebudayaan atau kumpulan Ilmu. Mazhab itu sebagai ide atau gagasan dan kemudian menampilkan dalam bentuk pola geomtris, dan juga dalam mazhab pemikiran itu terkandung sekumpulan konsep filosofis, keyakinan, keagamaan, nilai-nilai etika, dan metode praktis dan harmonis lewat hubungan yang rasional, yang akan melahirkan suatu kesatuan yang dinamis bermakna, terarah, dan terpadu, yang hidup dan semua bagian dijiwai oleh suatu spirit atau roh.¹⁹ Adapun yang membedakan dengan pembahasan jurnal ini adalah fokus pembahasannya terhadap pemikiran-pemikiran dan penjuangnya yang menggunakan Islam sebagai dasar ideologi sedangkan penulis hanya berfokus pada pemikiran politik Ali Syariati dengan membahas konsep negara dan *Ummah*.

2. Jurnal tahun 2009, Mukhlis, "Islam Dan Pemberontakan Terhadap Status Quo: Telaah Atas Pemikiran Teologi Sosial Ali Syariati", yang menjelaskan tentang seorang yang berkembang dalam situasi refresif dan tersadarkan atas ketertindasannya, maka pastilah wacana yang dikembangkannya adalah wacana yang pemberontakan terhadap penindasan atas dirinya. Dalam kondisi seperti ini tidak ada lagi paradigma yang cocok baginya selain paradigma konflik dan dialektika. Syariati berada dalam situasi tersebut, penindasan yang dialami diri dan masyarakat yang mengakibatkan megembangkan wacana pemberontakan terhadap status quo. Dikarenakan terpengaruh dengan Gurvitch, landasan dialektika yang dianutnya bukan interes ekonomi (materialisme) tetapi

¹⁹ Mashadi, "Pemikiran dan perjuangan Ali Syariati", *Jurnal Al-Ulum* 11, No. 1, Juni 2011.

nilai-nilai anutan. Jadi dia adalah seorang hegelian, tetapi dia menempatkan tempatnya khusus sebagai muslim, yaitu bahwa pondasi pemikiran yang terdalem tersarikan dari Al-Qur'an, sedangkan sosiologi hanya menjadi satu perangkat epistemologinya untuk mengartikulasikan nilai-nilai dasar yang diyakini dalam Islam.²⁰ Adapun yang membedakan dengan pembahasan jurnal ini adalah penulis lebih berfokus pada pemikiran politik Syariati, meskipun tak bisa dipungkiri bahwa ideologi dan pemberontakan status quo sangat berpengaruh terhadap pemikiran politik Ali Syariati.

3. Jurnal tahun 2016, Agustina Damanik, “ Pemikiran Ali Syariati tentang *Imamah*”, membahas tentang *Imamah* yang menurut Ali Syariati adalah kepemimpinan progretif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya yang berfungsi untuk membimbing manusia serta membangun masyarakat diatas pondasi yang benar dan kuat, yang mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Jadi *Imamah* merupakan manifestasi dari risalah kepemimpinan dalam membimbing individu dan masyarakat dari “apa yang kini ada” menjadi “apa yang seharusnya ada” semaksimal yang dilakukan bukan berdasarkan keinginan pribadi seorang Iman, tapi berdasarkan konsep yang baku yang menjadi kewajiban bagi Imam lebih dari individu lainnya. Pengaruh Ali Syariati sendiri yakni dalam membangun revolusi Iran sangatlah besar baik melalui ide-idenya maupun aksinya , beliau juga dikenal sebagai seorang yang multidimensi dan multi interpretable.²¹ Adapun yang membedakan dengan pembahasan jurnal ini

²⁰Mukhlis, “Islam Dan Pemberontakan Terhadap Status Quo: Telaah Atas Pemikiran Teologi Sosial Ali Syariati”, *Jurnal Ulumuna* 8, No. 2, Desember 2009.

²¹Agustina Damanik, “ pemikiran Ali Syariati tentang *Imamah*” *Jurnal yurisprudencia* 2, No. 2, Desember 2016.

adalah penulis hanya mencatat konsep *Imamah* sebagai individu yang sangat penting untuk mewujudkan konsep *ummah* yang diinginkan oleh Ali Syariati.

4. Jurnal tahun 2014, Zainal Abidin, “Dinamika Pemikiran Islam Indonesia: Sebuah Deskripsi Wacana Intelektualisme Islam di Indonesia”, menjelaskan tentang dinamika pemikiran Islam di Indonesia mengalami pasang-surut, yang di tandai dengan beragamnya varian pemikir yang ada termasuk tokoh-tokoh yang menggagas pemikiran. Pada umumnya gagasan pemikiran Islam selalu berhadapan dengan *establishment* pemikiran yang ada. Munculnya gagasan pemikiran Islam terkadang memicu berbagai reaksi dan respon balik yang menyebabkan sebagian tokohnya mendapat tantangan, tetapi tidak sedikit yang mendapatkan simpati. Namun secara realitas gagasan pemikiran tersebut telah memperkaya kanzah intelektualisme Islam di Indonesia secara dinamik.²² Adapun yang membedakan dengan jurnaal ini adalah penulis lebih fokus kepada pemikiran yang di bahas berdasarkan konsep pemikiran Islam Ali Syariati meskipun ini menjadi pembanding untuk melihat bagaimana relasi antara para pemikir Islam.
5. Skripsi tahun 2009, Muhammad Nasrul Fani, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Pemikiran Politik Islam (studi pemikiran Abdul Rahman Wahid dan Nurcholas Majid)” yang membahas tentang persamaan dan perbedaan pemikiran Gusdur dan Cak Nur, dimana dalam konteks plural Gusdur berkeyakinan bahwa meletakkan agama sebagai dasar negara atau formalisasi agama ke dalam struktur negara hanya akan berakibat pada rusaknya sistem *national-state*, hal ini disebabkan karena

²² Zainal Abidin, “Dinamika Pemikiran Islam Indonesia: Sebuah Deskripsi Wacana Intelektualisme Islam di Indonesia” *Jurnal Whana Akademika* 1, No.2 April 2014.

negara terbentuk dari berbagai proses yang bersifat manusiawi berdasarkan atas konsensus bersama antar manusia, sedangkan Cak Nur menyimpulkan bahwa paradigma Islam politik perlu dijinakkan. Secara normatif baik dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak di temukan perintah yang mutlak untuk mendirikan negara Islam atau partai Islam. Meskipun begitu kedua tokoh ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemikiran dan kehidupan dewasa ini.²³ Adapun yang membedakan dengan skripsi ini adalah penulis sama-sama membahas tentang pemikiran tokoh namun berada pada konteks sosial berbeda dan menjadi pembandingan dalam skripsi ini.



²³ Muhammad Nasrul Fani, "Pemikiran Politik Islam (studi pemikiran Abdul Rahman Wahid dan Nurcholas Majid)", Jurnal tahun 2009.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Teori Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan, Negara adalah *agency*/alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹ Negara dapat mengambil tindakan tegas dan bahkan negara dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap warga negara, jikalau itu dianggap sebagai bentuk penyelamatan terhadap negara.²

Menurut Holand D.J Laski mengartikan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan dari bagian masyarakat itu.³ Untuk itu negara harus selalu absah agar negara itu tidak jatuh dan menjadi kelompok kekerasan atau penjahat yang bisa melakukan tindakan kekerasan kepada warganya.⁴

Menurut mazhab teori negara, pokok bahasan politik yang tepat dan wajar adalah negara, sementara mereka yang menganut mazhab kekuasaan berargumen bahwa negara itu hanyalah wadah belaka yang digambarkan tidak lebih dari suatu bidak belaka, Robert Dhal menulis “Negara adalah sebuah bidak yang penting

¹Kabul Budiyono, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik* (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 27.

² Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Politik Profetik (Historis, Kontekstualitas dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politik)* (Cet. 1; Yogyakarta: PT.Gramasurya, 2015) h. 33

³Kabul Budiyono, h. 28.

⁴Syarifuddin Jurdi, h. 33

dalam pertarungan untuk kekuasaan, karena sumber-sumber negara yang relatif dan klaimnya yang eksklusif untuk mengatur alat-alat kekerasan fisik yang hebat, sehingga barang siapa mengendalikan negara maka sudah pasti memiliki kekuasaan”.⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara merupakan masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis, negara sebagai pusat lembaga yang menjamin kesatuan politisi itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Negara menurut Magnis-Suseno harus dikembalikan kepada satu fungsi formal yaitu negara memperlakukan, menerapkan, dan menjamin, seperlunya secara memaksa, keberlakuan aturan-aturan kelakuan bagi seluruh masyarakat.⁶

Pengertian formal negara ini menunjukkan bahwa negara memiliki otoritas yang besar, karena hanya negara yang patut ditaati aturan hukumnya, hanya negara yang dapat membuat kerangka dan batas terhadap kehidupan masyarakat, aturan hukum yang dibuat negara sebut hukum, semua aturan hukum yang ditetapkan oleh masyarakat hannya berlaku sejauh aturan itu sesuai dengan hukum yang ditetapkan negara. Pengakuan masyarakat terhadap wewenang untuk menetapkan hokum dan mejamin keberlakuannya termasuk hakekat Negara.⁷

Berdasarkan pandangan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun, mengemukakan hanya negara yang memiliki *ashabiyah* yang kuat akan mampu menciptakan sebuah peradaban umat manusia yang tinggi. Akan tetapi, jika rasa *ashabiyah* pudar dan hanya dipahami secara sempit, maka yang ada hanyalah nepotisme-absolut yang membuat hancurnya sebuah negara. Konsep *ashabiyah*

⁵ Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Politik Profetik (Historis, Kontekstualitas dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politik)* (Cet. 1; Yogyakarta: PT.Gramasurya, 2015), h. 34.

⁶Syarifuddin Jurdi, h. 34.

⁷Syarifuddin Jurdi, h. 34.

yang dimaksud Ibnu Khaldun dalam makna luas, bila ditarik pada dataran kehidupan berbangsa bernegara disebut dengan solidaritas dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan.⁸

Semakin besar dukungan rakyat, maka akan semakin kuat suatu negara. Akan tetapi, bila dukungan rakyat semakin kecil, maka semakin lemah bahkan terpecahlah suatu Negara. Menyadari bahwa eksistensi Negara merupakan sebuah institusi yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengayomi seluruh kepentingan rakyatnya, maka Ibnu Khaldun mencoba mengetengahkan konsep Negara (dalam pemikiran politiknya) secara universal dan fleksibel. Khaldun tidak menyebutkan bentuk Negara secara riil dan transparan.

Ibnu Khaldun memberikan kebebasan kepada setiap komunitas untuk menentukan bentuk negaranya, sesuai dengan cita-cita suatu bangsa yang bersangkutan. Melihat pemikirannya diatas, terkesan bahwa Khaldun sepertinya terwarnai oleh pandangan Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa Negara merupakan sesuatu yang diperlukan bagi menegakan perintah agama. Eksistensi merupakan alat belaka, bukan lembaga yang masuk pada institusi ajaran keagamaan secara intrinsic.⁹ Oleh karena itu, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan konsep dan bentuk yang ingin digunakan, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kesepakatan komunitas manusia pada suatu negara. Dalam konteks ini, yang diperlukan adalah bagaimana konsep atau bentuk tersebut mampu mewujudkan cita-cita dan menjamin terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat¹⁰

⁸Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 49-50.

⁹ Samsul Nizar, "Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun" *Jurnal DEMOKRASI* Vol.II No.1, 2003, h. 102.

¹⁰ Samsul Nizar, "Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun" *Jurnal Demokrasi* 2, No.1 (2003), h. 103

Melihat pentingnya negara yang menentukan segala aktifitas yang berada didalamnya, Ali Syariati memandang bahwa negara merupakan organisasi yang strategis untuk menentukan arah kelangsungan hidup yang ada didalamnya. Maka Negara menjadi upayah peningkatan kesejahteraan warga negaranya sebagaimana pesan dalam keagamaan. Ada dua fungsi utama negara yang tidak di miliki oleh organisasi lainnya. Yaitu:

- a. Negara merupakan lembaga yang mamiliki kekuasaan yang sangat besar didalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada dimasyarakat. Bahkan kalau perlu negara memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan keputusan masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkan.
- b. Kekuasaan yang snagat besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum, negara dapan memaksa kehendak melawan kepentingan pribadi¹¹.

2. *Teori Integrasi*

Teori integrasi berasal dari bahasa Inggris “*integration*” yang berarti kesempunaan atau keseluruhan. Integrasi adalah suatu keadaan dimana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap kompromitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat.¹² Menurut penganut paham integralisme menyebut bahwa Islam adalah sebuah sistem nilai yang komprehensif , mencakup seluruh dimensi kehidupan. Kerangka integrasi tersebut bermakna pada pembelajarann integrasi,

¹¹ Syarifuddin Jordi, *Ilmu Politik Profetik (Historis, Kontekstualitas dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politik)* (cet. 1; Yogyakarta: PT.Gramasurya, 2015), h. 33

¹² <https://www.scribd.com/doc/teori-integrasi//>, di akses pada taggal 4 april 2018.

artinya integrasi sains dan agama dapat dilakukan dengan memahami posisi agama dan sains.¹³

Secara etimologi, integrasi berasal dari kata latin yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kata integritas dibentuk kata sifat integer yang artinya utuh. Oleh sebab itu, istilah integrasi yang artinya membuat unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Pendekatan integralistik merupakan kerangka kerja untuk menyatukan ilmu-ilmu agama dan umum. Tidak hanya menggabungkan antara ilmu agama dan umum, melainkan mensinergikan keduanya. Menurut Kuntowijoyo ilmu integralistik merupakan hasil produk bersama seluruh manusia beriman, ilmu integralistik tidak akan mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia. Integralisme diharapkan menyelesaikan konflik antara sekularisme *ekstrem* dan agama-agama radikal.

Menurut perspektif ilmu politik, integrasi dalam sistem sosial politik misalnya merupakan kebutuhan yang mendesak untuk terus-menerus melanjutkan proses reformasi Islam, merekonsiliasi komitmen muslim dengan kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat.¹⁴

Integralisme merupakan postmodernisme rekonstruktif, jika postmodernisme merupakan kritik terhadap modernisme, integralisme dapat dipandang sebagai kritis terhadap postmodernisme yang setengah matang. Integralisme hendak mengintegrasikan pramodern, modern dan postmodern dalam satu konsep yang menyatukan ketiganya.

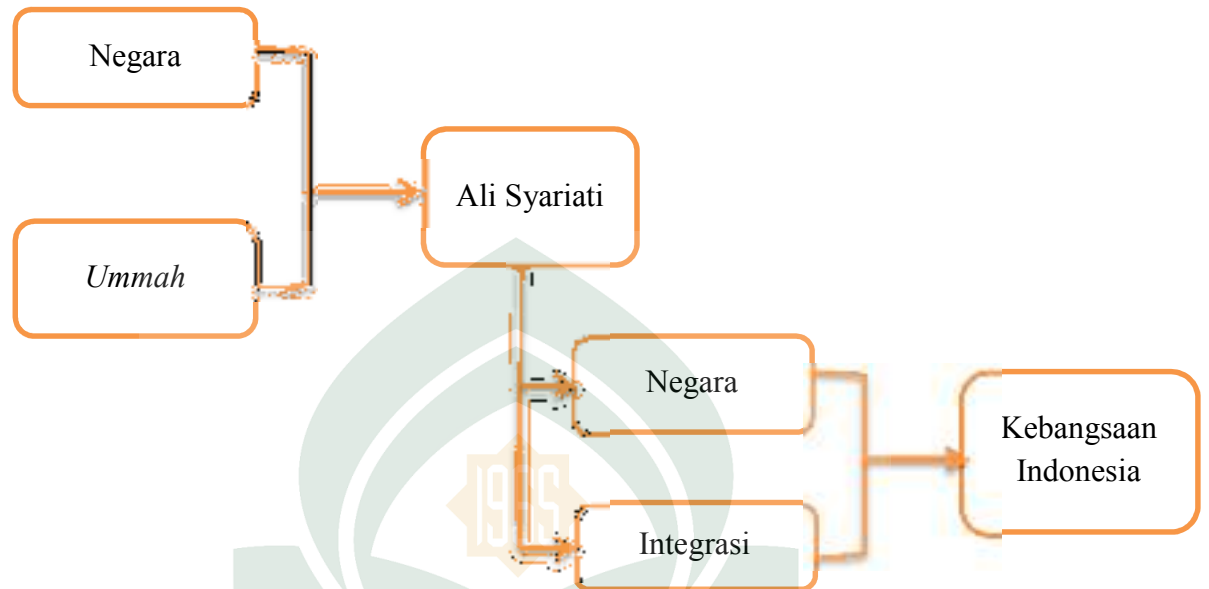
¹³ Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Politik Profetik (Historis, Kontekstualitas dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politik)* (cet. 1; Yogyakarta: PT.Gramasurya, 2015), h. 41.

¹⁴ Syarifuddin Jurdi, h. 43.

Pendekatan integrasi mensinergikan antara agama dan ilmu pengetahuan sebagai mana gagasan Jürgen Habermas tentang hubungan antara teori dan praksis, dan praksisnya dilakukan dengan refleksi teoritis yang merupakan paduan irama kritisisme yang berkelanjutan. oleh karena itu integrasi bersifat holistik yang berupaya mengembalikan keseimbangan.¹⁵



¹⁵ Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Politik Profetik (Historis, Kontekstualitas dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politik)*, h. 44.

B. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menguraikan pokok dan sub pembahasan ini, penulis mempergunakan beberapa metode dalam megumpulkan data. Penulis berusaha mengumpulkan data yang merupakan hasil penelitian-penelitian, terutama yang telah dipublikasikan, misalnya berupa buku, majalah, jural, ensiklopedia dan sejenisnya, adapun data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah dengan memakai pendekatan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis peneliatian yang penulis gunakan adalah kepustakaan (*library researc*) yaitu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku kepustakaan (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan data-data history.¹

B. Objek Kajian

1. Objek Material

Objek kajian dalam hal ini adalah pemikiran Ali Syariati

2. Objek Formal

Objek kajian dalam hal ini adalah pemikiran Ali Syariati tentang politik Islam

C. Sumber data

1. Data primer yaitu mengutip langsung dari buku-buku karangan Ali Syariati yang mencakup tentang pemikiran politik Islam.
2. Data sekunder yaitu data pelengkap yang dihasilkan dari buku-buku, jurnal, dan tulisan lainnya, serta pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh pemikir Islam yang berhubungan dengan tema penelitian².

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Cet. VIII; Yokyakarta: Gadjja Mada University Press, 1998), h. 64.

D. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan. Dengan demikian metode yang digunakan adalah menelaah literature dan referensi yang terkait dengan pembahasan. Sebagai literature utama adalah buku-buku langsung dari Ali Syariati. Adapun data-data penunjang adalah buku-buku, serta jurnal yang terkait dengan tema pembahasan³.

Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai *literature*. Sumber data ini didapatkan diberbagai tempat seperti Perpustakaan Umum UINAM, perpustakaan Fakultas Ushluddin Filsafat dan Politik, jurnal-jurna resmi yang telah diterbitkan di internet, di tokoh buku seperti Al-Farabi, Toha, dan Rausyah Fikr, buku online yang telah diterbitkan di *e-book* serta dari berbagai pihak yang membantu menyediakan data yang di butuhkan penulis.

Data yang didapatkan terlebih dahulu dibaca sesuai kebutuhan penulis, kemudian mengambil kesimpulan dari referensi yang tela dibaca, kemudian memasukkan pada tulisan penulis dan mencocokkandengan pemikiran yang sedang dibahas. Catatan lain adalah melakukan diskusi dengan beberapa pembaca Alin Syariati dan pembimbing agar apa yang ditulis oleh penulis menghasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan yang memiliki kesinkronan dengan masalah yang diangkat.

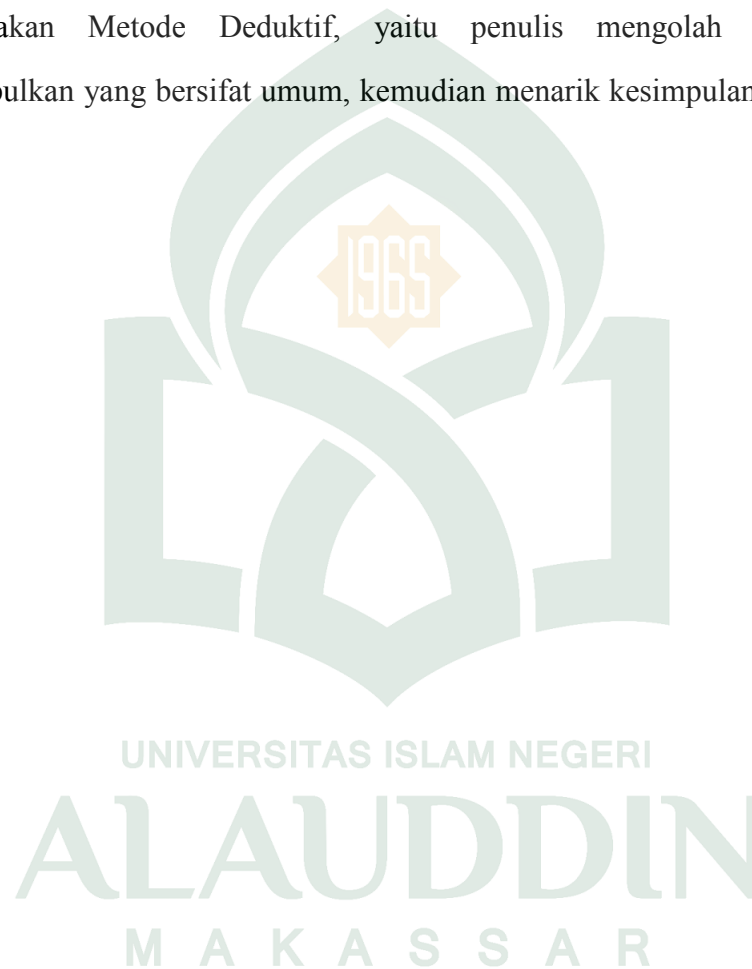
E. Metode analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analisis*). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru dan dengan data yang valid dengan memperhatikan konteksnya.

² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan penelitian dan Penulisan Skripsi (bidang ilmu agama islam)* (Cet. I; Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 59-60.

³ Cik Hasan Bisri, h. 61.

Dalam melakukan analisis terhadap data penulis menggunakan analisis data verstehen atau pemahaman dari dalam sebagaimana yang dikembangkan oleh Max Weber dan kemudian berorientasi pada analisis fenomenologi yang dikembangkan oleh Berger dan Lukman yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya dengan pemikiran sang aktor. Selanjutnya penulis juga menggunakan Metode Deduktif, yaitu penulis mengolah data dengan mengumpulkan yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Negara dan Ummah dalam Islam

Pada mulanya Al-Qur'an yang diturunkan sebagai wahyu oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad Saw, setelah masa konflik pertama dan hijrah ke Madinah. Wahyu yang diturunkan telah menggabungkan suku-suku Arab kedalam satu ikatan. Kerajaan Persia dan Romawi timur sama sekali tidak siap menghadapi peristiwa besar yang terjadi setelah penggabungan itu, jantung kawasan Eurasia jatuh ketangan mereka. Kemudian semua pencapaian itu atas dasar sebuah agama dan gagasan-gagasan baru yang degan khas menggabungkan iman dengan kekuasaan politik.¹

Keberanian Nabi Muhammad Saw yang khas telah membuat kagum ummat Islam sekaligus para ahli tentang Islam. Meskipun hanya sedikit yang mengetahui sosok Muhammad dan ajaran aslinya, fenomena ini meggambarkan sukses besar yang tidak dicapai oleh kebanyakan revolusi lainnya. Peristiwa ini juga yang menandai munculnya pemikiran politik Islam yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran lainnya. Dikatakan juga gagasan Islam merupakan dobrakan yang menentukan dalam sejarah pemikiran manusia tentang politik dan masyarakat.²

Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya melahirkan sebuah *Ummah* (bangsa, masyarakat) baru, mereka kemudian memunculkan rasa kebangsaan Arab dan satu bentuk komunitas Internasional baru. Dijantung proyek itu berlangsung peralihan kekuasaan dari kerajaan kepada Nabi (dan kemudian kepada ummat). Tujuan Muhammad persisnya adalah menunjukkan bahwa konsep keTuhanan

¹Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam (Dari Masa Nabi hingga Kini)*, terjemahan dari *the History of Islamic Political Thought: From the Prophet to The Present* oleh Abdullah Ali dan Marlana Ariestywati (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 35

²Antoni Black, h. 36.

sebelumnya meskipun atas dasar prinsip kemanusiaan gagal berhadapan dengan masalah-masalah politik kekuasaan.

Di sisi lain telah diciptakan sebuah masyarakat yang lintas suku dan lintas bangsa. Norma-norma syariat meletakkan dasar-dasar agar setiap orang dari berbagai keturunan, suku, dan bangsa dapat berinteraksi dan mendapat tempat berpijak yang setara, saling mengenal tanpa mengabaikan silsilah, suku atau kebangsaan masing-masing. Ini adalah versi baru ideal dari monoteisme tentang persaudaraan universal. Islam menyediakan jalur peralihan yang khas tribalisme menjadi masyarakat yang luas dan berstruktur.³

Era Rasulullah mencerminkan era persatuan, usaha dan pendirian bangunan ummat serta menampilkan ruh yang mewarnai kehidupan politik yang mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi-generasi yang datang kemudian. Sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw dan kaum mukminin dapat dikatakan sistem *Par excellence* dalam waktu yang sama juga dapat dikatakan dengan sistem religius. Sistem yang sempurna dalam merangkul urusan materi dan ruhani dalam mengurus urusan manusia di dunia dan akhirat.⁴

Politik Islam lahir dari latar belakang sosial yang berusaha memulihkan makna tradisi kenabian dan pewaris tradisi kenabian tersebut pasca wafatnya sang Nabi al-Mushtafa Saw. Meski dimuati banyak peristiwa berdarah yang disebabkan oleh konflik kepentingan tafsir atas wahyu Ilahi, namun masyarakat Islam berhasil merumuskan setidaknya satu definisi tentang politik Islam, yakni usaha (yang tidak mudah dan tidak selalu berhasil) untuk merawat kebersamaan

³Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam (Dari Masa Nabi hingga Kini)*, terjemahan dari *the History of Islamic Political Thought: From the Prophet to The Present* oleh Abdullah Ali dan Marlana Ariestywati (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 43-44.

⁴Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam terjemahan An-Nazhariyatu as-siyasatul- Islamiyah* oleh Andi Aderus banua dkk. (Jakarta: gema Insani Press, 2001), h. 6

(*ummah*) dan dalam ruang sosial demi terpeliharanya keadilan melalui manajemen kekuasaan berdasarkan wahyu Ilahi dan tradisi kenabian. Politik Islam senantiasa dimankai dalam bingkai sakralitas profetik.⁵

Ciri khas pada pandangan yang menonjol pada Islam terletak pada pandangan bahwa Islam adalah keyakinan akan kemaha kuasa Allah SWT. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia termasuk tentang negara dan politik. Politik memelihara ummat baik dalam maupun luar negeri, pelaksanaan praktisnya dalam *Daulah* (negara), sedangkan ummat melakukan *muhasabah* (kritik saran dan nasehat), kepada *daulah* (Khalifah). Politik dalam negeri dilaksanakan negara untuk memelihara urusan ummat dengan melaksanakan *madba* (akidah dan peraturan) Islam didalam negeri, Politik luar negeri dilakukan *daulah* untuk memelihara urusan umat diluar negeri dengan menjalin hubungan internasional dan menyebarkan *mabda* Islam keseluruh dunia.⁶

Ummat Islam wajib menyibukkan diri dalam menggeluti masalah politik internasional maupun regional sehingga paham akan fakta politik yang sedang terjadi dan mampu mengambil sikap berdasarkan *mabda* Islam untuk memelihara kepentingan umat dan *daulah*, baik didalam maupun diluar negeri. Dalam menggeluti politik dalam negeri, kaum Muslimin wajib memerhatikan pelaksanaan pemerintahan dan meluruskannya jika terjadi penyimpangan.⁷

Rasulullah Saw bersabda:

“Siapa saja yang memelihara penguasa yang zalim dengan menghalalkan apa yang di larangkan Allah, mengingkari janji Allah, menyalahi sunnah Rasul, mengambil hak-hak hamba Allah, lalu tidak mengubahnya dengan perkataan atau perbuatan, maka pasti Allah akan menempatkannya di tempat penguasa *Zalim* itu (di akhirat)”(H.R. Ibnu Katsir).

⁵Syahrir Karim, *Politik Islam I* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.15

⁶Muslim Mufti, *Politik Islam (Sejarah dan pemikiran)* (Cet.I; Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015), h. 15

⁷Muslim Mufti, h. 16

a) Negara dalam Islam

Para pemikir klasik mendefenisikan munculnya negara karena adanya hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan sesama manusia (Plato), negara merupakan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan sosial lebih kecil seperti desa dan kota (thomas aquinas).⁸ Menurut Joseph Raz negara itu sendiri merupakan wadah politik masyarakat yang dikuatkan melalui perkumpulan individu atau kelompok individu.⁹

Berbagai tentang teori legitimasi negara menempatkan negara sebagai pemilik tunggal kekuasaan. Akan tetapi kewenangan besar akan terjebak dalam praktek penyalahgunaan kekuasaan dan menempatkan warga sebagai korban, oleh karena itu muncul teori kedaulatan rakyat yang mengatakan bahwa kekuasaan negara yang luar biasa besar mesti berada di bawah kontrol rakyat.¹⁰

Pada pandangan ulama dan para politisi Islam menyatakan bahwa Islam adalah agama dan negara. Doktrin yang menyatakan bahwa Islam dan politik tidak terpisahkan, agama dan negara merupakan dua objek penting dalam politik Islam.¹¹

Dalam pandangan Rasyid Ridha, negara Islam jauh dari sistem kekuasaan yang menyeluruh yang mengatur setiap rincian kehidupan sosial, politik dan budaya kaum muslim. Menurutnya orientasi ideologis yang luas dari negara Islam adalah adanya pembaharuan tentang fundamentalisme, bukan merupakan langkah

⁸Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik(Kajian Mendasar Ilmu Politik)* (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 88.

⁹Yoyoh Rohaniah, h. 91.

¹⁰ Silvano Keo Bhaghi, *Negara Bukan-Bukan (Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi antara Agama dan Negara)* (Cet.I; Yokyakarta : Moya Zam Zam, 2016), h. 10.

¹¹Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islama (Siyasah Dusturiyah)* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 290

kembali pada keaslian Islam, hanya satu langkah kembali padai idealisme Islam awal yang ternodai oleh prasangka duniawi, etnis dan sektarian.¹²

Secara historis, cikal bakal negara Islam meski dalam bentuk yang sangat sederhana dan tidak tersebut secara yuridis formal, dapat dirunut sejak pasca lahirnya perjanjian *Hudaybiyah* II (Piagam Madinah), meskipun pendirian negara termasuk agama negara tidak diartikulasikan secara tegas oleh Nabi, namun persyaratann sebagai negara telah terpenuhi. Yang penting digaris bawahi adalah tidak adanya penyebutan Negara Madinah pada saat itu hingga banyak kalangan yang menyebut perjanjian itu sebagai bentuk kerjasama antara berbagai elemen masyarakat diberbagai wilayah.¹³

Negara yang dibangun oleh Rasulullah Saw dikenal sebagai negara Islam pertama. Karena Piagam Madinah dibuat secara tertulis, yang secara historis piagam itu merupakan perjanjian masyarakat tertua di dunia. Piagam Madinah merupakan landasan dasar sebuah konsep politik dan kenegaraan pertama di dunia Islam.¹⁴ Para peneliti sejarah Islam dan pakar politik Islam juga menyebut Piagam Madinah sebagai Konstitusi negara Islam pertama di dunia.¹⁵

Dalam piagam itu dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan masyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah persamaan kebebasan beragama, tolong menolong dan membela yang teraniaya, Musyawarah, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian,

¹²Muslim Mufti, *Politik Islam (Sejarah dan pemikiran)* (Cet.I; Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015), h.

¹³Rijal Mumazziq, "Konsep Negara dalam Islam (perdebatan Rasional yang tak Kunjung Tuntas)", *jurnal falasifa* I, No. 2, 2010, h. 115.

¹⁴Akbar S. Ahmed, *Rekonstruksi sejarah Islam (di Tengan Pluralitas Agama dan Peradaban)* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), h. 26.

¹⁵J. Sayuti Palungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dala Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 5.

Amar ma'ruf nahi munkar, ketakwaan dan kepemimpinann yang terangkum dalam butir-butir Piagam yang terdiri dari 47 pasal (terdapat pada lampiran)

Para ahli politik Islam memandang bahwa perpolitikan dizaman Nabi Muhammad Saw tidak terdapat perbedaan dengan teori politik modern terkait kriteria kepala negara serta fungsinya. Fungsi negara yang dilakukan oleh kepala negara adalah melaksanakan peraturan, menegakkan hukum, dan mengelolah semaksimal mungkin seluruh harta negara.

Al-Mawardi berpendapat bahwa fungsi negara yang harus diwujudkan oleh kepala negara adalah menjamin hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan, menegakkan keadilan, membangun kekuatan untuk menghadapi musuh, melakukan jihad terhadap orang yang menentang Islam, memungut pajak dan zakat, maminta nasihat dan pandangan dari orang-orang terpercaya, dan kepala negara harus langsung mengatur urusan ummat dan agama, dan meneliti keadaan yang sebenarnya.¹⁶

Setelah Rasulullah, kepemimpinan dilanjutkan oleh *Khulafah Ar-Rasyidin* yang memimpin negara dibawah petunjuk dan prinsip-prinsip Nabi. Akhirnya wilayah kekuasaan semakin berkembang dan luas. Setelah kepemimpinan berpindah ke tangan Khalifah bani Umayyah dan Abbasiyah, mereka memulai meninggalkan prinsip-prinsip ini sedikit demi sedikit, sehingga pada pemerintahan Abbasiyah tidak tersisah prinsip-prinsip ini dan hanya sebagian kecil aspek saja.¹⁷

Pengertian negara Islam sendiri adalah suatu negara yang menggunakan ajaran Agama Islam sebagai landasan dan dasar penetapan hukum positif yang

¹⁶Muhammad Azzizul Ghofar, *Jihad Fil Pancasila*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), h. 104.

¹⁷Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, terjemahan *Falsafah As-Siyasah bain Al-Fikrain Al-Islam wa Al-Gharbi* oleh Rosihon Anwar (Bandung: CV. Puustaka Setia, 2010), h. 242.

diberlakukan pada negara tersebut. Dengan demikian segala keputusan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan negara itu harus berdasarkan pada hukum agama Islam. Dalam hal ini mengacu pada Al-Qur'an dan hadis sebagai pijakan. Seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-An'am/6:38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”¹⁸

[472] Sebahagian mufasssirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.¹⁹ Selain itu Allah menjanjikan agar negara yang menjadi makmur seperti pada Q.S Al-A'raaf/7:96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya:

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”²⁰

¹⁸Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 133.

¹⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 210.

²⁰Kementrian Agama RI, h. 161.

Ayat diatas menjelaskan negara yang berpenduduknya bertaqwa akan diberikan dan dibukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi dan negara yang penduduknya banyak berlaku tindak kejahatan akan ditimpah bencana dan musibah.²¹

Pandangan Islam atau faham Islam mengenai negara sangat beragam dan memunculkan perbedaan yang tajam. Sebab antara negara ataupun politik merupakan sebuah ruang yang sangat kompleks dan penuh dengan perbedaan, dengan demikian akan dipenuhi dengan dimensi teologis yang saling berhubungan dengan aspek teologis serta kepentingan pragmatis. Dimana dalam dunia politik muslim mencul juga berbagai macam persaingan dan kompetensi.²²

b) Ummah dalam Islam

Abdul Rasyid memaknai *Ummah* Sebagai masyarakat, kelompok orang masyarakat ummat Islam yang dikenal dengan pengintegrasian dengan ideologinya, agama, misi, hukum dan tujuan hidup serta kesadaran untuk berkelompok, etika dan adat istiadat tanpa tergantung pada perbedaan baik terhadap daerah, warna, bahasa, ataupun yang lainnya.²³ Hal ini dijelaskan dan berulang pada Q.S Al-Baqarah/2:213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

²¹Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 144.

²² www.Anneahira.com/negara-Islam.htm di akses pada 30 april 2018.

²³Hendra Lesmana, "Bingkai Politik Islam dalam Perpektif Abdul Rasyid Moten suatu Upaya Membentuk *Ummah*", *jurnal Lentera* III, No. 1, Maret 2017, h. 167.

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.”²⁴

Selain itu kata *ummah* juga berulang pada Q.S Al-Ma'idah/5:48, Q.S Yunus/20:19, Q.S Hud/11:108, dan Q.S Al-Anbiya/21:92.

Kata *Ummah* pertamakali dibawa oleh konstitusi Piagam Madinah yang terletak pada pasal bagian pertama konstitusi tersebut yang berbunyi “sesungguhnya segenap mereka (warga negara) adalah satu bangsa-negara (*ummah*) bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya”. Perkataan ummat pada pasal ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, yang mengubah paham kewarganegaraan yang hidup di kalangan bangsa Arab.²⁵

Dalam Piagam Madinah pengertian *Ummah* dan cakupan maknanya dipergunakan dalam dua model dengan pasal yang berbeda, pertama dipakai menyebutkan komunitas seagama misal ummat Islam, ummat Yahudi dan lain sebagainya. Kedua dipakai untuk menyebutkan komunitas yang pluralistik dan terdiri atas berbagai agama, ras, dan suku namun bergabung dalam satu kesatuan politik seperti yang tercantum pada pasal 25 yang telah dipaparkan..²⁶

Secara historis keberadaan terma *Ummah* dalam masyarakat Madinah telah disadari sebagai bagian dari cara hidup penuh tanggung jawab dalam diversifitas elemen masyarakat dan ini sah menurut konsep *Ummah* dalam Al-

²⁴Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 35.

²⁵Zaenal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama didunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 98.

²⁶Zayad Abdul Rahman, “Konsep *Ummah* dalam Al-Qur'an: Sebuah Upaya Meleraai Miskonsepsi Negara-Bangsa”, *Jurnal Studi Islam* VI, No.1, April 2015, h. 12.

Qur'an, sehingga Nasionalisme dan teritorialisme dapat dipahami sebagai suatu yang Alamiah diterima mewakili kepentingan pembangunan sosio-politik tanpa pernah mengubah aspek teologis.²⁷ Ziauddin Sardar menyebutkan tujuan yang ingin dicapai *Ummah* yaitu ke keadilan dan Ilmu, Pencapaian ini dianggap wajib bagi *Ummah* yang merupakan pengembang amanat kekhalifan Tuhan.²⁸

Pada konsep *Ummah* dalam Piagam Madinah terkandung paham kebangsaan dan kenegaraan yang kemudian mempersatukan masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerjasama seerat mungkin dari masing-masing warganya demi keamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Dengan demikian telah tergambar suatu paham politik baru dikalangan warganya yaitu kesadaran paham bernegara walau dalam bentuk yang sederhana.²⁹

B. Relasi Negara dengan *Ummah* Menurut Ali Syariati

Ali Syariati saat kecil bernama Muhammad Ali yang lahir pada tanggal 24 November 1933 di desa Mazinan, pinggiran kota Masyhad dan Sabzavar provinsi Khorasan Iran. Seorang bayi yang lahir dari kalangan rakyat jelata, putra sulung dari pasangan Sayyid Muhammad Taqi' Syari'ati dan Putri Zahrah. Ali Syariati adalah nama yang diletakkan untuk bayi laki-laki itu, tumbuh dan dibesarkan di Mazinan, sebuah desa didekat Masyhad di timur laut Khurasan, negeri Iran.

Orang tuanya adalah keluarga yang cukup disegani ditengah-tengah masyarakat-masyarakatnya sebagai tokoh spritual yang senantiasa menjalankan ritual dan ritus keagamaan secara taat. Meskipun demikian keluarganya tetap merupakan keluarga yang layaknya penduduk kampung yang hidup seadanya.

²⁷ Zayad Abdul Rahman, "Konsep *Ummah* dalam Al-Qur'an: Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara-Bangsa", *Jurnal Studi Islam* VI, No.1, April 2015, h. 15-16.

²⁸ <http://www.MasyarakatIslam.com>, di akses pada 2 Mei 2018.

²⁹ Izzuddin, "Konsep *Ummah* dalam Piagam Madinah", *Jurnal Darussalam* VII, No. 2, Desember 2008, h. 118-119.

Dari keluarga itulah Ali Sayariati mulai membentuk mentalitas, kepribadian, dan jati dirinya.³⁰

Ali syariati merupakan keturunan dari ulama atau Kyai Muhammad Taqi Syariati, seorang ulama yang mempunyai silsilah panjang keluarga ulama dari Masyhad, kota tempat pemakaman Imam Ali Al-Ridha, Imam ke delapan dari kepercayaan Syi'ah. Sementara dari pihak ibunya, kakeknya bernama Akhum Hakim seorang ulama yang kisah hidupnya turut menginspirasi Ali Syariati. Sementara pamannya murid dari Adib Nishapuri yang setelah belajar filsafat, fiqh dan sastra kembali ke Mazinan.³¹

Rupanya lingkungan intelektual yang terbangun dari keluarganya, terutama ayahnya sangat mempengaruhi kecenderungan berpikir Syariati dan mengarahkan beberapa dimensi pemikirannya. Kebanggaan terhadap sang ayah begitu kental sebagaimana ia bertutur:

“Ayahku membentuk dimensi-dimensi pertama batinku, dialah mula-mula mengajarkanku seni berpikir dan seni menjadi manusia. Begitu ibu menasihku, ayah memberikan kepadaku cita, kemerdekaan, mobilitas, kesucian, ketekunan, keikhlasan, serta kebebasan batin. Ialah yang memperkenalkanku kepada sahabat-sahabatnya(buku-buku beliau), mereka menjadi sahabat-sahabatku yang tetap dan karib sejak tahun-tahun permulaan sekolahku. Aku tumbuh dan dewasa dalam perpustakaan, yang merupakan keseluruhan hidupnya dan keluarganya. Banyak hal yang akan aku pelajari kelak jika aku telah dewasa, melalui rangkain pengalaman yang panjang serta harus kubayar dengan usaha dan perjuangan yang lama, tetapi ayahku telah menurunkannya kepadaku sejak aku masih ana-anak dan masa remajaku secara spontan. Aku dapat mengingat kembali setiap bukunya bahkan bentuk sampulnya. Teramatlah cintaku terhadap ruang yang baik dan suci itu. bagiku ia merupakan sari masa lampauku yang manis, indah tetapi jauh”.³²

³⁰ Eko Supriyadi, *Jejak Ali Syariati suatu Sketsa Biografi dalam Sosialisme Islam(Pemikiran Ali Syariati)* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.27.

³¹ Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016). h. 19.

³² Ali Syariati, *Suatu Sketsa Biografi dalam Paradigma Kaum Tertindas* (Cet.II; Islami Center Jakarta Al-Huda, 2001), h.18.

Bukan hanya ayahnya, pemikiran Ali Syariati terpengaruh oleh kakek-kakeknya yang suci, terutama tentang filsafat yang mempertahankan jati diri manusia pada masa ketika segala macam kefasikan dan dekadensi telah meraja lelah. Adalah Akhund Hakim, kakek Syariati yang sering diceritakan kepadanya, yang telah memberi inspirasi bagi benih-benih kesadaran kesadaran yang tumbuh bagi jiwa Ali Syariati.³³ Begitu juga pamannya yang merupakan salah seorang murid terkemuka dari ulama termasyhur, Adib Nisyaputri. Tetapi setelah belajar fiqh, filsafat dan sastra, dia mengikuti jejak leluhurnya kembali ke Mazinam.³⁴

Pada tahun 1956 Ali Syariati meneruskan studinya di Fakultas Sastra di Masyhad,³⁵ Setelah lulus dari Universitas Masyhad, Syariati melanjutkan studinya di Universitas Paris dengan beasiswa selama lima tahun.³⁶ Di Paris Ali Syariati yang kemudian membahas karya-karya Fanon dalam artikel untuk suatu jurnal sosial politik yang diterbitkan oleh mahasiswa Iran di Eropa. Menurut pendapat Ali Syariati, buku “ *the Wretched of the Earth* (yang terkutuk di bumi) ” mengandung analisis sosial dan psikologis mendalam tentang revolusi Aljazair adalah bingkai intelektual bagi mereka yang memperjuangkan kemerdekaan di Iran terpengaruh dengan Fanon muncullah ungkapan seperti berikut:

“Kawan-kawan, mari kita tinggalkan Eropa, mari kita hentikan sikap meniruniri Eropa. Mari kita tinggalkan Eropa yang sok berbicara tentang kemanusiaan, tapi dimana-mana kerjanya membinasakan manusia.”³⁷

Bentuk perlawanan Ali Syariati yang menonjol pasca kembali ke Iran yaitu membangun kesadaran baru anak-anak muda Iran melalui ceramah dan diskusi

³³ Eko Supriyadi, *Jejak Ali Syariati suatu Sketsa Biografi dalam Sosialisme Islam (Pemikiran Ali Syariati)* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 30.

³⁴ Ali Syariati, *Suatu Sketsa Biografi dalam Paradigma Kaum Tertindas* (Cet.II; Islami Center Jakarta Al-Huda, 2001), h. 16.

³⁵ Ali Syariati, h. 20.

³⁶ Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 23

³⁷ Ali Syariati, h.22.

ilmiah untuk membedah keadaan Iran masakini. Pada september 1964 Syariati mendapat kesempatan untuk mengartikulasikan seluruh idealismenya di Universitas Mashad. Ia menerbitkan karya *Monumental Eslamshenasi (Islamology)* yang didasarkan pada naska-naska kuliah yang diberikannya dalam suatu kursus dalam sejarah Islam.³⁸

Visi Syariati yang kuat adalah menjadikan Syi'isme revolusioner yang peduli pada nilai-nilai kemanusiaan dan menentang status quo dan rezim yang tiram. Ali Syariati berpandangan bahwa kebangkitan kembali Islam harus dibekali dengan slogan-slogan yang memasuki cita-cita mulia yang ditawarkan oleh ideologi kontemporer. Penentangan Syariati pada sistem monarki merupakan visi politiknya yang bersumber dari kajian dan analisis terhadap pengembangan politik Iran.³⁹

Maskipun teori-teori Syariati berorientasi kepada Islam, namun basis epistemologis, filosofis, historis dan sosiologisnya sangat kuat dan tumbuh dari dialektika pengalaman dan pemikiran terus menerus. Dalam pandangan Ali Syariati berpikir benar adalah pengantar kepada pengetahuan yang benar, sedang pengetahuan yang benar adalah pengantar kepada iman. Bersama ketiganya merupakan alat kelengkapan bagi hati nurani yang sadar dan bagi setiap usaha mencapai kesempurnaan praktis maupun teoritis.⁴⁰

Selain kativitas dan gerakan politik Ali Syariati, Ia juga meninggalkan warisan dalam bentuk rekaman ceramah-ceramah, catatan-catatan kuliah, buku-buku serta berbagai artiker yang telah berkali-kali dicetak ulang atau diperbanyak dalam edisi sepuluh ribuan kopi atau lebih. Karya dan ide-idenya sangat menarik perhatian angkatan muda dan sangat mendalam pengaruhnya atas mereka,

³⁸Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (Cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 26.

³⁹Syarifuddin Jurdi, h. 28.

⁴⁰Ali Syariati, *Suatu Sketsa Biografi dalam Paradigma Kaum Tertindas* (Cet.II; Islami Center Jakarta Al-Huda, 2001), h. 26

sehingga tidak mudah menghapusnya dari ingatan dan hati mereka. Meskipun teori-teori Syariati berorientasi kepada Islam, namun basis epistemologis, filosofis, historis, dan sosiologisnya sangat kuat yang tumbuh dari dialektika pengalaman dan pemikiran terus menerus.⁴¹

Ali Syariati memahami Islam sebagai dasar munculnya semua pemikiran yang membantunya menemukan berbagai konsep tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hidup dengan menggunakan Istilah-Istilah Al-Qur'an sekaligus mengetahui sejarah secara segar dan lebih tepat.⁴² Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam Politik disebut dengan *siyasah*.

Dalam perspektif Ali Syariati *siyasah* berdasarkan makna praktisnya adalah suatu falsafat yang mendobrak dan dinamis. Politik dalam pandangan barat jelas sangat berbeda dengan konsep *siyasah*, karena menurut Ali Syariati politik sama sekali tidak membangun melainkan bertopang pada “apa yang harus dikerjakan” dan politik hanya bertujuan untuk mengatur negara tidak atas dasar ideologi revolusioner.⁴³ Perspektif adalah kerangka konseptual, asumsi dan gagasan yang kemudian mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

Filsafat pemerintahan yang dibangun atas dasar *siyasah* menurut Ali Syariati jauh lebih tinggi dibanding filsafat yang dibangun dengan *politique*, namun berdasarkan dalil yang menyatakan bahwa “segala sesuatu itu memiliki kepastian yang menyimpan dan jatuh sesuai dengan tingkat ketinggian naiknya”, maka

⁴¹Ali Syariati, *Suatu Sketsa Biografi dalam Paradigma Kaum Tertindas* (Cet.II; Islami Center Jakarta Al-Huda, 2001), h. 26.

⁴²Ali Syariati, *Paradigma Kaum Tertindas; Sebuah Kajian Sosiologi* terjemahan *On the Sociology of Islam and the Visage of Muhammad* (Cet. II; Jakarta: Islami Center Al-Huda, 2001), h. 37.

⁴³Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausahfikir Institute, 2014), h. 55-56.

disisi lain yang terdapat pada *siyasah* jauh lebih berbahaya dan menjebak dari masyarakat daripada *politique*.

Secara teori maupun praktis, *siyasah* lebih mudah dan lebih cepat menjelma kebrutalan disaat ia berada ditangan diktator ketimbang yang ada pada *politique*. Sebab pada saat itu penguasa lebih mirip polisi ketimbang dengan pelayan. Sistem diktator dalam sejarah tidak pernah mengumandangkan “politik demi reformasi”.⁴⁴

Melihat kondisi masyarakat barat dan timur yang memiliki perbedaan perilaku masyarakat, Ali Syariati melihat kebebasan-kebebasan politik dan tumbuh suburnya semangat individualistik serta kebebasan berpikir dan demokrat terdapat di barat, sedangkan di timur terjadi hal yang sebaliknya.

Hal ini menyebabkan di timur berkembang kaidah rakyat yang mengikuti penguasa serta pemasungan anspirasi rakyat, pengendalian kebijaksanaan pemerintah, penindasan alam fikir. Tentu saja hal seperti ini membuat pemberangusan hak seseorang secara mengerikan.⁴⁵

1. Negara

Selain untuk menghindari akan terjadinya kekacauan, ummat Islam membutuhkan negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Itu mengisyaratkan bahwa negara hanyalah alat bukan sebagai tujuan. Alat untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa ada ketidak adilan, penindasan dan kekacauan. Dari sekian banyak figur ulama dan cendikiawan, Ali Syariati merupakan salah seorang diantaranya yang mengusung berdirinya negara

⁴⁴ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2014), h. 56.

⁴⁵ Ali Syariati, h. 57.

yang Islami. Ini terlihat dari aksi-aksinya dalam pembebasan negara Iran dari rezim Syah Pahlevi.⁴⁶

Pemikiran Ali Syariati merupakan pemikiran yang multidimensi yang selalu berlandaskan dengan Al-Qur'an. Ali Syariati tidak secara terang-terangan mengemukakan konsep negara, tetapi dapat dipahami dari berbagai tulisan-tulisannya yang serupa dengan konsep negara. Negara-Kota Athena memiliki prinsip melibatkan seluruh warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan dan menunjuk orang yang baik dalam pemerintahannya melalui suatu pemilihan yang kemudian konsep ini memiliki makna yang sama dengan *qaum* yang merupakan konsep Ali Syariati yang diambil dari Al-Qur'an yang kemudian dikategorikan sebagai negara kolektif.⁴⁷

Lembaga-lembaga yang terdapat pada negara kota tidak memikul tanggung jawab terhadap pandangan hidup masyarakat, pendidikan yang harus diterapkan orang tua, modernisasi pemikiran keagamaan atau melakukan perbaikan moral masyarakat, negara kota hanya bertanggung jawab terhadap administrasi negara yang sedemikian rupa dan membuat masyarakat mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan yang kemudian memelihara sistem-sistem umum yang ada.⁴⁸

Dalam konteks *Siyasah* tujuan negara dalam filsafat politik adalah merombak bangunan, pranata-pranata, dan hubungan-hubungan sosial, bahkan akidah, Akhlak, peradaban tradisi sosial, merealisasikan cita-cita dan harapan yang lebih sempurna, serta membimbing masyarakat mencapai kemajuan yang semua itu dapat dirumuskan dalam satu kalimat pendek yaitu “membangun

⁴⁶Abdul Mu'thi Bayumi, *Negara dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Majalah Sinar Muhammadiyah, 2007), h. 12.

⁴⁷Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 111.

⁴⁸Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausahfikir Institute, 2014), h. 51.

Masyarakat”. hal ini jelas berbeda dengan pandangan barat yang melihat tujuan negara hanya pada batas melayani masyarakat agar hidup secara nyaman, bukan melakukan perbaikan terhadap masyarakat agar mereka bisa hidup dengan baik.⁴⁹

Istilah *qaum* merupakan suatu konsep politik yang menunjukkan konteks sosial masyarakat muslim untuk menunjukkan adanya suatu kelompok manusia yang hidup bersama berdasarkan nilai-nilai hidup yang sama tanpa adanya unsur yang membedakan jenis kelamin dalam unsur politik yang netral. Ali Syariati menggunakan konsep *qaum* yang dimaknai sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki kekuatan dan tekad.⁵⁰

Kansep *qaum* sangat banyak disebutkan oleh Allah SW, sehingga konsep tersebut muncul 383 kali dalam al-Qur'an sebagai bagian dari terjemahan negara kolektif yang mencerminkan sebagai adanya prinsip-prinsip politik yang kuat dan menjadi dasar pembentukan negara ideal. Konsep ini dikembangkan Ali Syariati berdasarkan bacaan dari tulisan w.Montgomery Watt dalam bukunya *Muhammat at Madinah*.⁵¹

Qaum tidak menunjukkan pada corak yang heterogen tetapi peluang dan potensi warganya untuk mengembangkan dirinya tetap terbuka luas, Ali Syariati menunjukkan istilah *qaum* sebagai suatu yang beragam, misalnya *qaum* dikaitkan dengan karakter tertentu antara lain menunjukkan pada sifat yang positif, bermakna negatif dan makna lainnya seperti kaitannya dengan *qaum* yang cerdas atau intelektual.^{3e}⁵² seperti yang tercantum dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an diantaranya tentang kaum yang mengambil pelajaran pada surah Al-An'am/6;126:

⁴⁹Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausahfikir Institute, 2014), h. 55.

⁵⁰Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (Cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 111.

⁵¹Syarifuddin Jurdi, h.130.

⁵²Syarifuddin Jurdi, h. 112.

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran.”⁵³

Ayat tersebut menjelaskan tentang jalan yang disiapkan serta sarana lainnya agar seseorang tidak mengalami kerancuan, tidak juga sesat jalan hingga mencapai tujuannya.⁵⁴ Selain pada ayat diatas kata *qaum* juga terdapat pada beberapa ayat seperti tentang *qaum* yang berakal pada Q.S Al-Baqarah ayat 162, *qaum* yang mengetahui pada Q.S Al-Baqarah ayat 230, *qaum* yang memahami pada Q.S Al-An'am ayat 98, *qaum* yang berfikir pada Q.S Yunus ayat 24, dan *qaum* yang mendengar pada Q.S Yunus ayat 67.

Sama halnya dengan pemerintahan kerakyatan negara-kota Athena, *Qaum* dalam pengertian Ali Syariti bersifat positif untuk menyerukan pada pembetulan tata sosial politik yang ideal, *qaum* yang hendak merealisasikan misi besar kemanusiaan untuk menghasilkan manusia-manusia yang unggul, masyarakat ideal dan negara yang memberi ruang bagi keterlibatan aktif warga dalam kehidupan politik pemerintahan.⁵⁵ Ali Syariati menghendaki negara untuk mengontrol semua Individu tetapi negara tidak mengambil hak pribadi setiap individu tersebut.⁵⁶

Islam yang sesungguhnya meniupkan kemuliaan kepada manusia di alam ini bahkan sebagai pemegang amanat khusus untuk mengelolah alam ini. Allah SWT juga telah memberikan hak istimewa kepada manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini. Untuk mengefektifkan tugas kekhalifaan ini maka

⁵³Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 125.

⁵⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 659-660.

⁵⁵Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (Cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 113.

⁵⁶Faiq Tobroni, "Pemikiran Ali Syariati dalam Sosiologi (dari Teologi menuju Revolusi)", *Jurnal Sosiologi Reflektif* X, No. 1, Oktober 2015, h. 253.

manusia membentuk suatu negara, negara yang sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana konsep sosiologis Ali Syariati yang mengkritik kapitalisme yang tidak melahirkan tragedi kemanusiaan. Menurut Qomaruddin Khan, Ali Syariati mengutip hal ini pada Q.S Al-Imran/3:110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”⁵⁷

Ayat diatas menegaskan tentang persatuan dan kesatuan mereka yang dituntut. Kini dikemukakan bahwa kewajiban itu dan tuntutan itu pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat ini sebaik-baiknya umat. Ini yang membedakan mereka dan sementara Ahl Al-Kitab yang mengambil sikap bertolak dengan itu. Tanpa ketiga hal yang disebutkan oleh ayat ini, kedudukan mereka sebagai sebaik-baiknya ummat tidak dapat mereka pertahankan.⁵⁸

Menurut Ali Syariati gagasan Marx mengenai sama rasa sama rata dalam sistem negara tanpa kelas sungguh luar biasa, suatu perencanaan yang didalamnya tidak ada nilai bagi setiap orang imbalan sederajat dengan kerjanya tetapi yang ada hanya sama rasa sama rata yang artinya menjunjung tinggi kemutlakan manusia suatu usaha yang berhak menerimanya tapi merupakan janji kepada masyarakat bawah, setiap orang akan menerima dari apa yang menjadi haknya.⁵⁹

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 75.

⁵⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h.

⁵⁹Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (Cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 125-126.

Argumen Ali Syariati terhadap sistem Marxisme mencerminkan adanya masalah yang ditimbulkan oleh sistem tersebut, konstruksi negara tidak hanya bertentangan dengan kodrat penciptaan manusia tetapi juga konstruksi tersebut juga menghasilkan pola hubungan yang bersifat terikat dan membelenggu kebebasan manusia, padahal manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi manusia yang bebas. Negara pada dasarnya menurut Ali Syariati terikat dengan nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat.⁶⁰

Negara harus mampu mengatur ekonominya agar tidak jatuh kepada kaum elit orang kaya saja yang akan menguasai kaum miskin,⁶¹ Agar keuntungan-keuntungan tidak hanya ada pada penguasa yang kemudian selalu memonopoli sejarah.⁶² Menurut Ali Syariati faktor ekonomi inilah yang menjadi pengejaran superioritas yang kemudian membutuhkan agama dan pelegitimasi agar dapat berkembang sebagaimana semestinya.⁶³

Ali Syariati menampilkan bahwa Islam menuntut pemenuhan secara merata, hak yang sama disetiap golongan masyarakat, kemudian meletakkan nilai keadilan Islam bukan semata-mata sebagai suatu prinsip Islam tapi untuk mengatur seluruh aspek Islam.⁶⁴

2. *Ummah*

Istilah *Ummah* berasal dari kata '*amma*' artinya bermaksud dan berniat keras. Pengertian seperti ini terdiri atas tiga arti yakni gerakan, tujuan dan ketetapan hati yang sadar. Sepanjang kata *amma* itu pada mulanya mencakup arti "kemajuan" maka tentunya ia memperlihatkan diri sebagai kata yang terdiri atas

⁶⁰Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (Cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 127.

⁶¹Faiq Tobroni, "Pemikiran Ali Syariati dalam Sosiologi (dari Teologi menuju Revolusi)", *Jurnal Sosiologi Reflektif* X, No. 1, Oktober 2015, h. 254.

⁶²Ali Syariati, *Agama vs Agama*, (Cet; Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 41.

⁶³Ali Syariati, h. 40.

⁶⁴Eko Supriyadi, *Jejak Ali Syariati suatu Sketsa Biografi dalam Sosialisme Islam (Pemikiran Ali Syariati)* (Cet. II; Yogyakarta: RausyanFikr Insitute, 2013), h. 130.

empat arti yaitu usaha, gerakan, tujuan dan kemajuan. Secara prinsipil tetap berarti jalan yang terang yang artinya sekelompok manusia yang menuju ke jalan tertentu. Yang dalam Islam diartikan ada sekumpulan manusia yang mamilih jalan yang sama untuk menuju suatu tujuan.⁶⁵

Ali Syariati membuat perbandingan yang telah berkembang dalam ilmu-ilmu sosial seperti *nation, strata, class* atau *social class, race, mas* atau *society*, ketika Ali Syariati membagi konsep tersebut memetakannya. Tampak Ali Syariati sedang mamikirkan bagaimana pola pembentukan kehidupan bersama yang bersifat ideal, kemudian ia memilih konsep *ummah* sebagai bentuk kehidupan bersama yang jauh lebih ideal bila dibandingkan dengan konsep yang lainnya.⁶⁶

Ummah adalah istilah yang digunakan oleh Ali Syariati untuk menyebutkan konsep masyarakat yang ideal karna memiliki ke istimewaan yaitu menempatkan kebersamaan dalam arah tertentu serta memebentuk kekerabatan baik lahir maupun batin sebagaimana sebagai ciri dasar yang mengikat manusia. Selain dalam Piagam madinah Ali Syariati mengutip beberapa ayat yang berkenaan dengan konsep *ummah*, seperti pada konsep perjanjian masyarakatan pada Q.S Al-Imran/3:104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung”⁶⁷

⁶⁵Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausyanfikir Institude, 2014), h. 44-45.

⁶⁶Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 130.

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 74.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan ma'ruf.⁶⁸ Ayat lain yang dikutip oleh Ali Syariati adalah dalam Q.S Al-Nahl ayat 120,121,122, dan 123, Q.S Al-Baqarah/2:134,143, Q.S /16:34, Q.S/7:34,159,164 Q.S Al-Maidah/5:48, Q.S Al-Imran/3:103.

Hampir mirip dengan konsep Qabilah yang memiliki kesamaan dan keyakinan sebagai mana halnya kaum muslimin, tetapi mereka tidak melangkah dilangkah yang sama dan serempak menuju ke arah yang sama. Tujuan yang ingin mereka capai berada pada titik tertentu. Sedangkan yang mereka lakukan menuju ke arah yang lain. Akan tetapi dalam istilah *ummah* gerak yang mengarah ke tujuan bersama itu justru merupakan landasan ideologi.⁶⁹

Menurut Ali Syariati *ummah* adalah kumpulan manusia yang para anggotanya tujuan yang sama yang satu sama lain saling bahu membahu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan berdasarkan suatu kepemimpinan yang kolektif. Istilah ini juga menghimpun beberapa konsep-konsep yaitu kebersamaan dalam arah dan tujuan, gerakan menuju arah dan tujuan tersebut, dan keharusan adanya pemimpin dan petunjuk kolektif.⁷⁰

Saat individu-individu yang terdiri atas manusia itu menjadi anggota suatu *ummah* maka ia wajib mematuhi pimpinan komunitasnya dan menaati dengan ketaan tanpa paksaan. Individu dalam suatu *ummah* memiliki hak dalam menjalankan akidah dan kewajiban-kewajiban didepan komunitasnya,

⁶⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 208.

⁶⁹Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2014), h. 46.

⁷⁰Ali Syariati, h. 47.

sebagaimana halnya masyarakat harus memiliki ideologi atau aqidah (ideologi pada gilirannya berarti merealisasikan cita-cita dan mencapai kemajuan).⁷¹

Untuk mewujudkan *ummah* atau masyarakat ideal yang dicita-citakan oleh Ali Syariati maka harus ada pemimpin yang menjadi petunjuk kolektif yang masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Individu yang menyatakan diri sebagai *ummah* bukanlah individu yang bebas semata tetapi individu yang memiliki tanggung jawab dan mengetahui siapa imamnya dan mengakuinya.

Ummah adalah refleksi dari akidah dan kebersamaan yang mengisyaratkan adanya pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat diterima oleh semua orang dan mengharuskan mereka bergerak ke arah yang sama dan tujuan secara bersama-sama. Menurut Ali Syariati *ummah* merupakan manifestasi dari sekumpulan individu yang merasa untuk bergabung dibawah kepemimpinan yang agung dan tinggi yang dapat mamikul tanggung jawab terhadap kemajuan dan kesempurnaan individu masyarakatnya.

Ummah harus meyakini adanya keharusan yang menyatakan bahwa yang namanya kehidupan itu tidak harus hanya berada pada taraf eksis saja tetapi harus tetap berjalan menuju kesempurnaan dan kesadaran terhadap jati diri yang mutlak. Ini bukanlah kehidupan yang mapan dalam kondisi dan situasi manapun melainkan suatu transformasi yang terus menerus berkelanjutan guna menyempurnakan kemanusiaan. Hijrah yang abadi yang dilakukan untuk mencapai fitrah anak Adam serta mencapai ketinggian sejauh mungkin dari yang bisa dicapai oleh manusia yang beragam ini.⁷²

⁷¹Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2014), h. 48.

⁷²Ali Syariati, h. 64.

a. Manusi ideal

Masyarakat Islam yang ideal disebut *ummah* yang menggantikan semua konsep yang semacamnya yang dalam berbagai bahasa dan budaya menunjukkan pada pengelompokan manusia atau masyarakat seperti bangsa, rakyat, suku, klan dan sebagainya, kata *Ummah* yang sama dengan semangat progresif serta mengandung pandangan sosial yang dinamis, komit dan ideologis.⁷³

Menurut Ali Syariati manusia ideal adalah manusia sempurna yang dalam pribadinya ruh Allah SWT telah memenangkan belahan diri yang berkaitan dengan Iblis, dengan lempung dan dengan lumpur endapan. Dia telah bebas dari bimbang dan kontradiksi antara dua invinita. Berakhlak dengan Akhlak Allah yang merupakan standar kita dan merupakan semua standar konvensional demi mendambakan karakteristik serta atribut Allah.⁷⁴

Manusia andalan ini adalah manusia yang berdimensional yang bagaikan seekor burung yang dapat terbang mengangkasa. Manusia yang berfikir filosof tapi tidak terlena atas nasib ummat manusia, keterlibatan politik tidak menyeretnya kepada demagogi dan riya, sedangkan daya fikir tidak melumpuhkan daya fikir dan deduksi logisnya.

Manusia ideal yang diinginkan Ali Syariti adalah manusia yang tidak berakhir dan monoton pada satu dimensi saja dan melupakan unsur lainnya tapi manusia yang dapat menggabungkan semua situasi dan perasaan tanpa meninggalkan satu bagian saja, manusia yang memiliki tanggung jawab besar, komitmen dan memikirkan segalanya tanpa mengutamakan keegoisan diri, manusia yang menjalin hubungan dengan Allah SWT tetapi tidak

⁷³Ali Syariati, *Paradigma Kaum Tertindas; Sebuah Kajian Sosiologi Islam* terjemahan *On the Sociology of Islam dan The Visage of Muhammad* oleh Saifullah Mahyudin (Cet. II; Jakarta: Islami Center Jakarta Al-Huda, 2001), h. 107.

⁷⁴Ali Syariati, h. 108.

mengenyampingkan manusia lainnya, melainkan membuat manusia lainnya menjadi manusia yang sempurna.

Manusia dimensional yang memiliki tiga talent utama yaitu kesadaran, kemampuan iradah, dan daya cipta. Dimana semua ini merupakan atribut-atribut dari sifat-sifat Tuhan yang membuat manusia ini memiliki kualitas-kualitas tertentu dari penciptanya, namun sayang sekali terkadang dengan selubung atau baju ideologi kadang menjadi faktor yang menghambat dan membatasi kemampuan ini.⁷⁵

Menurutnya manusia ideal seperti ini adalah manusia yang membentuk lingkungannya bukannya terbentuk dari lingkungan yang ada disekitarnya. Manusia sempurna yang bisa bebas dari belenggu paksaan (berbagai problematika kehidupan) dan bebas atas dirinya sendiri serta memberontak atas egonya.⁷⁶

Manusia ideal ini memiliki tiga aspek yaitu kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Dia adalah kehendak yang komik dengan tiga macam dimensi yaitu kesadaran, kemerdekaan, dan kreativitas.⁷⁷ Hal ini menjadi landasan dasar yang dijadikan panutan oleh Ali Syariati untuk menciptakan peradaban manusia yang sempurna. Sebagai contoh yang ideal untuk mewujudkan konsep *ummah* yang diinginkan oleh Ali Syariati. Kriteria ini diambil dari sifat yang di tunjukkan oleh Rasulullah Saw, selain itu ia juga mengidolakan Ali bin Abi Thalib ra, dan Husein sebagai pemimpin kaum tertindas.

⁷⁵Ali Syariati, *Tugas Cedikiawan Muslim*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Gafindo, 1995), h. 85.

⁷⁶Ali Syariati, *Paradigma Kaum Tertindas; Sebuah Kajian Sosiologi Islam* terjemah *On the Sociology of Islam dan The Visage of Muhammad* oleh Saifullah Mahyudin (Cet. II; Jakarta: Islami Center Jakarta Al-Huda, 2001), h. 109.

⁷⁷Ali Syariati, h. 110

b. Pemimpin dalam Ummah

Untuk mewujudkan konsep *ummah* maka diperlukan pemimpin sebagai panutan yang mengatur *ummah* agar menjadi manusia yang sempurna. Dalam konsep *ummah* pemimpin disebut dengan *Imam* yang memiliki pengertian lebih umum dibandingkan dengan pengertian pemimpin politik, ketua partai, pahlawan dan superman yang memberikan bimbingan kepada masyarakatnya semasa hidup mereka, dengan bimbingan khusus dan kemudian mengatur dan memimpin mereka.⁷⁸

Imam mempunyai peran pendidikan yang selama ini telah dimainkan oleh para hero, idola, panutan-panutan bahkan para kepala suku yang mitis. *Imam* merupakan perwujudan kasat mata bagi nilai-nilai keyakinan, perealisasi kemandirian dari konsep-konsep pemikiran, dan keteladanan kasat mata bagi hakikat yang diserukan oleh risalah serta diasasnya ia berusaha mendidik mereka, dengan demikian dalam perwujudan *Imam* itu terwujud ideologi dan konteks yang real.

Seorang *Imam* tidak hanya terbatas pada pemimpin umat manusia dalam salah satu aspek politik, kemasyarakatan dan perekonomian juga tidak terbatas pada masa-masa tertentu pada kedudukannya sebagai panglima *Amir* atau *khalifah*. Tetapi tugasnya adalah menyampaikan kepada umat manusia dalam semua aspek kemanusiaan yang bermacam-macam.⁷⁹

Ali Syariati berulang-ulang mengatakan dalam tulisannya bahwa *Iman* bukanlah supramanusia melainkan manusia yang pada umumnya tetapi yang membedakannya adalah kesiapan spiritual dan moralnya. *Imam* adalah manusia

⁷⁸Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2014), h. 131.

⁷⁹Ali Syariati, h. 132.

biasa yang telah mencapai tingkat yang semestinya dicapai oleh manusia yang orang lain belum mencapainya, tetapi mereka juga harus berusaha mencapainya.

Imam merupakan pemimpin yang progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik yang kejam guna membimbing manusia serta membangun masyarakat diatas pondasi yang benar dan kuat yang bakal mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian dalam mengambil keputusan.⁸⁰

Kelebihan-kelebihan kemanusiaan ini teraktualisasikan pada diri, agar kemanusiaan dapat berdiri dengan atas kenyataan bahwa agama yang kita idealkan dan kita jadikan petunjuk sebagai *Madinah Al-Fadhilah* yang sangat mungkin di landaskan di bumi.⁸¹

3. Relasi Ummah dan Negara Ideal

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya tentang bagaimana konsep negara dan konsep *ummah* yang ideal seperti yang diinginkan oleh Ali Syariati, negara merupakan wadah yang dibutuhkan oleh *ummah* sebagai tempat merealisasikan sistem pengaturan manusia.

Prinsip ideal yang dianut dalam konsep negara yang mampu memberikan nilai-nilai kebaikan, kesejahteraan dan keadilan kepada warganya pada prinsipnya sejalan dengan makna *ummah* yang dimaksud oleh Ali Syariati sebagai bentuk ungkapan terhadap kumpulan orang dimana setiap individu sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing bergerak ke arah tujuan yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama.⁸²

⁸⁰Ali Syariati, *Islam, Mazhab, Pemikiran dan Aksi*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 65.

⁸¹Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan dari *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausahfikir Institute, 2014), h. 153-154.

⁸²Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 127.

Solidaritas keagamaan yang terdapat dalam Islam menurut Espasito telah menggantikan ikatan suku, *ummah* merupakan wahana dinamis didalam melaksanakan tugas Ilahi dalam masyarakat yang kemudian dapat menjadi contoh bagi negara lain diluar Islam.

Ummah merupakan bagian integral dari peroses pembentukan masyarakat, karena dalam *ummah* terdapat *state* (negara), *society* (masyarakat) dan *leadership* (kepemimpinan), itulah yang dianalisis Esposito dalam poreses pembentukan negara pada tahun 662 M dan bukan pada masa awal Nabi Muhammad Saw menerima wahyu tahun 610, karena pada tahun 622 M merupakan tahun dimana negara, masyarakat dan kepemimpinan sudah eksis.

Konsep *ummah* menjadi cikal bakal terbentuknya negara ideal karena didalamnya dibutuhkan pemimpin yang ditaati, dihormati, didengar fatwa dan anjurannya, diteladani dan dipatuhi segala perintahnya oleh masyarakat.⁸³ dengan kata lain Konsep *ummah* tidak akan berjalan lancar ketika tidak terdapat negara sebagai wilayah yang diduduki oleh individu-individu yang membuat kesatuan kelompok dan memilih pemimpin sebagai panutan untuk mencapai kesejahteraan.⁸⁴

Negara harus mampu mengatur masyarakatnya kemudian menciptakan aturan yang tidak hanya berpihak kepada pemerintah tetapi aturan yang membuat masyarakatnya merasakan kesejahteraan hingga menjadi manusia-manusia ideal dibawah kepemimpinan yang merupakan manusia ideal seperti yang di inginkan oleh Ali Syariati.⁸⁵

⁸³Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan (Pemikiran Politik Ali Syariati)* (cet. 1; Gowa: Laboratorium Ilmu Politik, 2016), h. 128.

⁸⁴Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* terjemahan *Al Ummah wa Al Imamah* oleh Afif Muhammad (Cet. III; Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2014), h. 38.

⁸⁵Ali Syariati, *Paradigma Kaum Tertindas; Sebuah Kajian Sosiologi Islam* terjemahan *On the Sociology of Islam dan The Visage of Muhammad* oleh Saifullah Mahyudin (Cet. II; Jakarta: Islami Center Jakarta Al-Huda, 2001), h. 110.

Melihat apa yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa konsep-konsep yang ditawarkan oleh Ali Syariati adalah konsep yang memiliki kemiripan dengan beberapa konsep lainnya, artinya konsep yang tawarkan oleh Ali Syariati tidak orisinal atau dengan kata lain konsep ini merupakan hasil pengaruh dari konsep-konsep pemikir lainnya, yang menarik dari Ali Syariati adalah ia selalu mengaitkan dengan konsep yang ada pada al-Qur'an, sehingga konsep yang lahir dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan mudah dikonsumsi oleh masyarakat Muslim terutama di Indonesia.

Begitu pula dengan konsep *ummah* yang menurut Syarifuddin Jurdi, Ali Syariati tidak menjelaskan *ummah* ini secara terperinci konsep seperti apa, berbeda dengan dengan pemikir Jhon El-elposito yang membekas *ummah* dan *Imamah* sebagai konsep negara dan warga negara.⁸⁶ Namun, tulisan-tulisan Ali Syariati selalu dijadikan sebagai motifator bagi beberapa kalangan untuk melawan pemerintah yang tiran sebagai dampak dari revolusi yang terjadi di Iran.

C. Relasi Negara dan Ummah Menurut Ali Syariati dalam Perspektif Kebangsaan Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir dengan sejarah panjang dengan penuh perjuangan, tidak hanya berasal dari satu pemerintahan atau kerajaan, namun Indonesia merupakan gabungan dari beberapa pemerintahan atau kerajaan yang kemudian melebur menjadi satu kebangsaan dibawa pemerintahan presiden Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Undang-undang dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia menjadi norma dasar pembuatan aturan untuk mengatur masyarakat agar dapat hidup rukun dan saling membantu untuk terciptanya masyarakat maju.

⁸⁶www.Ruslanbima.wordpress.com diakses pada 4 agustus 2018.

Bangsa Indonesia membutuhkan wawasan kebangsaan untuk menentukan cara suatu bangsa tentang bagaimana mengelolah dan mengenal kondisi geografis negaranya, sosial-budaya, politik, ekonomi, dan pertahanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.⁸⁷ Konsep wawasan Indonesia yang tercantum pada sumpah pemuda 28 oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Wawasan seperti ini, pada hakikatnya tidak membedakan asal suku, keturunan, ataupun perbedaan warna kulit. Dengan kata lain wawasan seperti ini mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.⁸⁸ Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki lambang yang juga sebagai ideologi negara yaitu Pancasila yang merupakan pandangan hidup, dasar negara dan sebagai ideologi nasional.⁸⁹ Selain itu juga dikenal istilah Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan hidup ummah beragama, suku dan ras di Indonesia telah berkembang sejak lama dan menjadi pegangan bangsa Indonesia untuk tetap hidup saling berdampingan.⁹⁰

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep negara kolektif dan konsep *ummah* yang dimiliki oleh Ali Syariati memiliki relasi dengan konsep kebangsaan yang telah dirumuskan oleh para penguasa terdahulu. Yang kemudian tak dapat dipungkiri bahwa konsep Ali Syariati seringkali diserap oleh para pemuda untuk melawan pemerintah yang zalim.

⁸⁷Idup Suhady, *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2006), h. 20.

⁸⁸Idup Suhady, h. 2.

⁸⁹Tukiran Taniredja, *Pendidikan Kewarganegaraan : Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2.

⁹⁰Idup Suhady, h. 22.

1. Konsep Negara dan Pancasila

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat Islam terbesar di dunia, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan yang lahir dari suatu kesepakatan-kesepakatan politik antara kekuatan-kekuatan sosial politik bangsa Indonesia. Pancasila bukanlah sistem kepercayaan yang lepas begitu saja dari paham keagamaan, juga bukan sistem abstrak tetapi mengakomodasi nilai-nilai spiritual warganya serta keragaman adat istiadat bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila menjadi manifestasi kesadaran kolektif bangsa Indonesia.⁹¹

Pancasila dipandang sebagai sumber untuk menggerakkan dan memobilisasi kekuatan rakyat, baik melalui perkumpulan sukarela maupun melalui media massa, Pancasila juga telah menjadi identitas nasional baik bagi kalangan kebangsaan maupun Islam.⁹² Kata Islam yang telah diletakkan sebagai pondasi dalam ideologi Pancasila, kemudian dalam Pancasila ditanamkan nilai-nilai Islam.⁹³

Islam sebagai aturan dan pandangan hidup yang telah lengkap dan sempurna dalam mengatur segala aspek kehidupan dan memiliki bobot yang tinggi dalam membentuk struktur sosial dan politik.⁹⁴ Secara nasional Pancasila memiliki nilai-nilai yang mempunyai kedudukan dan kebenaran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai yang merupakan ukuran tingkah laku yang bersifat nasional itu mutlak diperlakukan karena langsung menyangkut pada kemantapan perkembangan bangsa Indonesia secara nasional maupun internasional. Hal ini

⁹¹ Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia; Konteks Ideologi dan Kepentingan* (Cet. I; Gowa: Lab. Ilmu Politik UINAM, 2015), h. 35.

⁹² Syarifuddin Jurdi, h. 35.

⁹³ Fokky Fuad, "Islam dan Ideologi Pancasila, sebuah Dialektika", *Lex Jurnalica* IX, No. 3, Desember 2018, h.107.

⁹⁴ Syarifuddin Jurdi, h. 38.

menjadi tujuan bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.⁹⁵

Melihat bagaimana posisi dan penjelasan mengenai Pancasila sebagai suatu landasan negara, hal ini kemudian memiliki relasi dengan konsep negara yang diinginkan oleh Ali Syariati. Sekalipun konsep Pancasila sempat dikritik oleh pemikir Islam terkemuka di Indonesia Muhammad Natsir, yang mengkritik pancasila dengan mengatakan bahwa dalam perkembangannya ibarat cek kosong yang bisa diisi dan ditafsirkan oleh siapa saja sesuai dengan pandangan dan kepentingan sang penafsir. Seperti yang dilakukan oleh kelompok PKI dan penafsiran Soekarno terhadap Pancasila⁹⁶

Negara yang mampu menciptakan masyarakat ideal menurut Ali Syariati Adalah negara yang tidak berpihak kepada kaum elit, negara yang mampu mengatur serta adil terhadap rakyatnya, negara yang kolektif, negara yang memiliki moral, dan negara yang berlandaskan dengan syariat Islam. Dalam poin Pancasila sendiri tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun beberapa pihak mengatakan bahwa sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sekuler membebaskan seseorang untuk beragama atau tidak⁹⁷, akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut, dapat dilihat pada Q.S Al-Baqarah/2:163 yang berbunyi:

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

Terjemahnya:

⁹⁵ Siti Nurjannah, ”Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Pelajar; Upaya Mencegah Aliran Anti Pancasila di Kalangan Pelajar”, *Jurnal Study agama* V, No. 1, Juni 2017, h. 102.

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 220.

⁹⁷ Muhammad Azizul Gofar, *Jihad Fil Pancasila*, (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), h. 118.

”Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”⁹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Dialah Allah yang Maha Esa yang maha Pemurah lagi Maha Penyayang.⁹⁹ Selain itu juga terdapat pada Q.S Al-Maidah/5:73

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.”¹⁰⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak berbilang, melainkan Maha Esa, tiada yang meyekutui-Nya Tuhan semua yang ada dan Tuhan semua makhluk. Jika mereka tidak berhenti dari kebohongan dan kedustaan, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih.¹⁰¹

Ayat diatas merupakan bukti bahwa sila pertama tidak menyalahi al-Qur'an sebagai pedoman hidup ummat muslim, soal kata “Tuhan” dan bukannya “Allah” menunjukkan penerapan toleransi yang tinggi terhadap ummat beragama di Indonesia. Penerapan toleransi beragama ini sama dengan penerapan toleransi umat beragama di negara Madinah dibawah pimpinan Nabi Muhammad Saw.¹⁰²

Jika ditelaah lebih lanjut sifat Ketuhanan yang Maha Esa tidak kita temukan dalam pemahaman sifat Tuhan pra-Islam, yang berada pada pemahaman

⁹⁸Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 25.

⁹⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 249.

¹⁰⁰Kementrian Agama RI, h. 113.

¹⁰¹Quraish Shihab, h. 158.

¹⁰²Muhammad Azizul Gofar, *Jihad Fil Pancasila* (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), h. 122.

yang animisme-dinamisme dan bergerak padamas Hindu-Budha yang meyembah pada banyak Dewa yang tidak mengilhami nilai ideologi Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Islam datang untuk meluruskan pemahan atas konsep keTuhanan yang dianut masyarakat Nusantara selama ribuan tahun.¹⁰³

Peletakan ideologi keTuhanan Islam dalam sila-pertama menunjukkan bahwa Islam telah hadir dan mewarnai kehidupan masyarakat Nusantara sejak lama hingga kini. Hal ini juga menunjukka makna bahwa sila-pertama tidak mengandung penutupan hak hidup bagi pemeluk agama lain di Indonesia. Jika sila-pertama ini dimaknai sebagai bagian dari nilai luhur nenek moyang asli bangsa Indonesia, maka secara logika akan sulit diterima karena mengingat nenek moyang kita berada pada pemahaman Tuhan dari masa animisme, dinamisme, Hidu-Budha yang semuanya mengenal konsep Politheisme.¹⁰⁴

Pada sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan wujud bahwa masyarakat indonesia memiliki berbagai perbedaan namun memiliki perlakuan yang adil dan sesuai dengan norma yang berlaku tanpa pandang bulu karena menjunjung nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁵

Sikap adil dan beradap merupakan cerminan sifat Tuhan yang Maha Adin dan sifat Tuhan yang maha memuliakan Hambah-Nya. Sifat ini wajin diteladani, dimana manusia melihat dirinya sebagai kreasi atau ciptaan Tuhan yang Maha Esa oleh karena itu manusia harus meyadari dan meneladani sifat-sifatNya. Oleh karena itu, masyarakt Indonesia dengan sila-kedua ini telah diterima dikanca Internasional. Bangsa dengan konsep penghargaan dan penghormatan yang tinggi

¹⁰³Fokky Fuad, “Islam dan Ideologi Pancasila, sebuah Dialektika”, *Lex Jurnallica* IX, No. 3, Desember 2018, h. 165.

¹⁰⁴Fokky Fuad, h. 166.

¹⁰⁵Muhammad Azizul Gofar, *Jihad Fil Pancasila* (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), h. 123.

atas nilai kemanusiaan yang menolak penjajahan, sifat perilaku destruktif baik atas nama agama maupun kesukuan. Manusia diciptakan sederajat, manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang bertaqwa kepada-Nya.¹⁰⁶

Pada sila ke-3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia” merupakan bentuk pemersatu bangsa dengan kondisi Indonesia yang multi etnis. Kata “persatuan” digunakan untuk menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan penghormatan terhadap perbedaan dan tidak membedakan serta mempersatukan berbagai perbedaan yang ada untuk menjadi Indonesia yang satu dan saling bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa.¹⁰⁷ Sesungguhnya manusia telah diciptakan dari berbagai suku seperti yang telah dijelaskan pada Q.S Al- Hujurat/49:13 yang berbunyi :

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁰⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menceritakan bahwasanya Dia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan Istri, yaitu Adam dan Hawa, kemudian Ia menjadikan mereka berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal diantara sesamanya. Sesungguhnya kalian berbeda-beda

¹⁰⁶Fokky Fuad, “Islam dan Ideologi Pancasila, sebuah Dialektika”, *Lex Jurnalica* IX, No. 3, Desember 2018, h.167.

¹⁰⁷Muhammad Azizul Gofar, *Jihad Fil Pancasila*, (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), h. 126.

¹⁰⁸Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 251.

dalam keutamaan disisi Allah hanyalah ketakwaan, bukan keturunan atau kedudukan.¹⁰⁹

Selain ayat diatas ada beberapa ayat, ada beberapa ayat juga yang selaras dengan sila ke-3 seperti Q.S Al-Hujurat Ayat 9 dan 10, yang merupakan bukti bahwa islam mengajak umat muslim untuk tidak melakukan tindakan separatis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan Indonesia hendaknya dijunjung tinggi oleh semua kalangan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tentram dan mencegah berbagai potensi konflik demi terwujudnya kerukunan yang harmonis disemua kalangan masyarakat Indonesia.¹¹⁰

Masyarakat dan bangsa Indonesia menciptakan kesadaran dalam sikap batin akan kesamaan nasib yang menyatukan semua komponen anak bangsa dalam semangat Nasionalisme. Fahaman ini juga telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dengan mengadakan perjanjian perdamaian dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Dimana piagam ini kemudian dibuat perjanjian untuk menyatukan hubungan persaudaraan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi yang tinggal bersama di Madinah. Dimana kedua belah pihak bersepakat untuk saling membantu dalam hal terjadinya peperangan yang mereka hadapi, yang menciptakan kesadaran bahwa kita hidup dibawah atap lagit yang sama. (lihat lampiran tentang isi Piagam Madinah).¹¹¹

Pada sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, dalam Islam kebebasan setiap orang dalam mengutarakan pendapat tidak disalahkan namun tata cara pemilihan dalam Islam memiliki aturannya sendiri, dengan syarat pemimpin

¹⁰⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*. (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 95.

¹¹⁰Muhammad Azizul Gofar, *Jihdf Fil Pancasila* (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), h. 130.

¹¹¹Fokky Fuad, “Islam dan Ideologi Pancasila, sebuah Dialektika”, *Lex Jurnalica* IX, No. 3, Desember 2018, h. 167

harus amanah, dapat menyampaikan, memiliki kecerdasan, dan sebagainya. Secara keseluruhan proses pemilihan pemimpin yang terjadi di Madinah dilaksanakan dengan sistem demokrasi melalui majelis Syuro. Majelis Syuro sendiri memiliki kesamaan fungsi dengan MPR, diluar pelanggaran yang dilakukan oleh anggota MPR, setidaknya keberadaan dan fungsinya serta tugas pokok tidak menyalahi al-Qur'an,¹¹² hal ini juga memiliki keselarasan dengan Q.S Ali Imran/3:159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”¹¹³

Ayat diatas menjelaskan bahwa sikapmu yang lemah lembut kepada mereka merupakan rahmat dari Allah, kerana jika kamu berkeras hati dalam menghadapi mereka niscaya mereka akan bubar, dan melakukan musyawarah dengan mereka apabila mendapatkann masalah untuk menegakkan hati mereka.[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.¹¹⁴

Ayat lain yang mamiliki keselarasan penjelasan tentang sila ke-4 adalah Q.S Asy-Syura/:38 dan Al- Mujadilah/:9-1. Dalam hal ini dapat dilihat

¹¹²Muhammad Azizul Gofar, *Jihad Fil Pancasila*, (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), h. 131.

¹¹³Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 72.

¹¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*. (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h.85.

keselarasan antara Pancasila dengan Al-Qur'an untuk mendahulukan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu keputusan untuk kepentingan bersama untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan kebijakan serta peran masyarakat umum untuk memberikan masukan sangat diperlukan dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat.¹¹⁵

Konsep musyawarah yang berikan Islam terhadap ideologi negara ini merupakan hak yang penting dalam menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia, dialog yang mengedepankan akal sehat daripada kekerasan yang akan menimbulkan kerusakan. Selain itu sikap musyawarah ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah Saw yang menerima pendapat para sahabat yang lebih mengetahui permasalahan tertentu, kemudian sikap ini diikuti oleh para sahabat saat memilih *khalifah* pengganti Rasulullah.¹¹⁶

Para Bapak-Bangsa Indonesia juga menginginkan demokrasi yang dilaksanakan dengan cara musyawarah dibarengi dengan pengetahuan serta dilaksanakan dengan bijaksana, bukan dengan memaksa kehendak karena ketidaktahuan akan nilai luhur demokrasi. Kemudian hukum hadir untuk membatasi dan menghindari kebebasan yang tidak bertanggung jawab.¹¹⁷

Sila ke-5 sekaligus sila terakhir Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang menerangkan bahwa bangsa Indonesia tidak berlebi-lebihan serta bermegah-megahan yang akan berakhir mubassir dalam kehidupan hal ini mengajarkan masyarakat Indonesia untuk saling bergotong royong dalam membangun negara demi mencapai kebaikan bersama. Nilai-nilai

¹¹⁵Muhammad Azizul Gofar, *Jihad Fil Pancasila*, (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), h. 134.

¹¹⁶Fokky Fuad, “Islam dan Ideologi Pancasila, sebuah Dialektika”, *Lex Jurnalica* IX, No. 3, Desember 2018, h. 169.

¹¹⁷Fokky Fuad, h. 169.

kebersamaan serta keadilan dijunjung tinggi dalam penerapan sila ke-5 hal ini tercermin pada surah An-Nahl/16:71 yang berbunyi :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah[832]?.”¹¹⁸

[832] Ayat ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaan dalam Islam.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah diantara kalian ada yang kaya dan adapula yang miskin, tapi mereka tidak mau menjadikan harta yang telah diberikan menjadi milik bersama dengan hambah-hambah sahaya mereka, mengapa mereka menjadikan sebagian dari milik-milik Allah menjadi sekutu-sekutunya.¹¹⁹

Selain ayat diatas juga terdapat pada Q.S Al-A'raf/:31, Al-Maidah/5:2, Ali Imran/3:180, Al-Furqaan/:67 dan sebagainya. Anjuran mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama sepatutnya dilaksanakan oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Penerapan serta pembenaran sila ke-5 ini merupakan salah satu bentuk penerapan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Harta yang didistribusikan oleh manusia adalah harta milik manusia lainnya, konsep pemusatan harta di tangan golongan tertentu tidak dapat diterima kerana akan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang mejadi jurang pemisah

¹¹⁸Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 275.

¹¹⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*. (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 183.

antara si kaya dan si miskin. Konsep ini diterapkan dalam Islam secara kongkrit dalam bentuk zakat. Dimana zakat adalah bentuk nyata dari tebaran kesejahteraan umat, harta yang diperoleh secara benar dan didistribusikan secara adil.¹²⁰

Jika dilihat dari negara kolektif dan negara yang memihak rakyatnya yang ingin diciptakan oleh Ali Syariati, Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki kesamaan untuk konsep negara tersebut, sekalipun Indonesia bukanlah negara Islam tetapi negara yang menganut sitem dan landasan berdasarkan Syariat Islam. Meskipun benturan pemahaman antara hukum Islam dan hukum negara masih tetap muncul.¹²¹ Tetapi perdebatan antara golongan Islam dan Nasionalisme bahwa Islam dan pancasila mampu menciptakan proses dialogis sehingga tidak perlu lagi dibenturkan kedalam ideologi yang saling berbenturan sekaligus berhadap-hadapan.

Uraian diatas telah telah menjelaskan bahwa pancasila dibuat berdasarkan kepentingan bangsa Indonesia agar menciptakan masyarakat yang sempurna dan ideal. Negara yang masyarakatnya saling membantu satu sama lain dalam mencaipai kebajikan. Namun, hal ini masih saja tidak dilaksanakan secara baik oleh beberapa oknum, seperti pada urusan pemilihan wakil rakyat atau pemimpin, saat pelaksanaan terlihat seakan semua berjalan sesuai prosedur, akan tetapi dibalik prosedur tersebut banyak oknum-oknum yang melakukan hal yang bertentangan dengan pancasila. Seperti yang terjadi disalah satu desa di Bulukumba, kecamatan Kajang, desa Tambangan. Disetiap pemilihan, masyarakat tidak memilih atas kehendaknya sendiri, tapi selalu mengikuti instruksi dari oknum tertentu.

¹²⁰Fokky Fuad, "Islam dan Ideologi Pancasila, sebuah Dialektika", *Lex Jurnalica* IX, No. 3, Desember 2018, h. 170.

¹²¹Fokky Fuad, h. 164.

Masyarakat yang memiliki pilihan yang berbeda dengan pemimpin terpilih tidak mendapat perhatian lebih, infrastrukturnya yang diberikan kepada rakyatpun tidak merata. Hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga membuat nilai kolektif kian merosot dan mulai hilang. Saling membenci akibat pendapat yang berbeda yang mengakibatkan tidak adanya sifat kritis bagi generasi muda dan memaksa mereka mengikuti prosedur yang telah disiapkan oleh penguasa. Hal seperti ini yang menurut Ali Syariati jika dilihat dari negara kolektif yang ia cetuskan, tidak dapat menciptakan masyarakat sempurna. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan permusuhan dan saling menjatuhkan.

Masyarakat harus mampu membuka pikiran dan lebih kritis dalam menerjemahkan roda pemerintahan, agar generasi berikutnya mengerti dan paham nilai-nilai dasar ideologi bangsa Indonesia. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang tidak mudah diprookasi dan selalu taat terhadap aturan. Tidak menjadikan ajang pemilu sebagai ajang pencarian uang tetapi menjadikan pemilu sebagai ajang pencarian pemimpin yang baik yang peduli terhadap rakyat serta selalu sportif dalam segala hal.

2. Konsep Ummah dan Pluralisme

Negara Indonesia menganut multikulturalisme yang tercerminkan dalam simbol yang telah disepakati bersama yakni Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pengakuan terhadap heterogenitas etnik, budaya, agama, dan gender yang kemudian menuntut adanya komitmen politik membangun negara kesatuan republik Indonesia.¹²²

Isu multikulturalisme muncul pada 2002 sebagai alternatif yang kuat untuk menjadi perekat baru kesatuan bangsa. Konsep multikulturalisme kemudian selalu dibicarakan secara bersamaan karena masing-masing membicarakan

¹²²Ratna Subakri, "Membumikan Multikulturalisme Indonesia", *Jurnal Antropoli Sosial Budaya Etnovisi* II, No. 1, April 2016, h. 1.

tentang keberagaman sosial dan budaya. Pluralisme menekankan pada suku bangsa dan kebudayaannya, multikulturalisme menekankan pada relasi antar-budaya.¹²³

Menurut Fatih Osman al-Qur'an sengaja menyapa manusia dengan sebutan "anak cucu Adam" (*banu Adam*) karena menurutnya kita harus mencintai semua orang tanpa pertimbangan ras, suku, agama, gender, dan pandangan. Oleh karena itu menurutnya, perbedaan suku, bangsa, atau kelompok adalah tanda keagungan Tuhan yang bertujuan saling mengetahui, bekerjasama dan berlomba dalam melaksanakan kebaikan. Sebab seandainya mau, Tuhan dapat menciptakan satu kelompokn saja.¹²⁴

Pluralis-multikultural sangatlah penting bagi pengembangan masyarakat karena menjadi sebuah patokan untuk melahirkan rasa toleransi terhadap segala perbedaan. Toleransi yang kemudian harus dilestariakan agar tidak menimbulkan konflik dan tetap aman kerena mengingat bangsa Indonesia yang memiliki ragam budaya, etnis dan Ras yang sangat banyak.¹²⁵

Ketika kita telah mengakui realitas heterogenitas dalam masyarakat, maka saat itu masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong agar kemajemukan di Indonesai dapat tampil sebagai suatu kekuatan untuk membangun bangsa dan negara.

Konsep Pluralisme yang merupakan wujud perealisasiian dari simbol negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dimana manusia saling menghargai dan menoleransi masyarakat yang berbeda agama, etnis dan ras antara satu Individu dengan Invidu lainnya. Hal ini kemudian memiliki relasi dalam konsep

¹²³ Ratna Subakri, "Membumikan Multikulturalisme Indonesia", *Jurnal Antropoli Sosial Budaya Etnovisi* II, No. 1, April 2016, h. 5.

¹²⁴ Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban* (Jakarta: Democracy Project, 2012), h. 177.

¹²⁵ Desi Erawati, "Interpretasi Multikulturalisme Agama dan Pendidikan", *Jurnal Agama dan Masyarakat* XIII, No. 1, Juni 2017, h. 20.

Ummah yang telah dipaparkan Oleh Ali Syariti yang diambil dari salah satu konsep Islam yang mengakui keberagaman dan perbedaan suku-bangsa, agama dan budaya.

Pluralisme dimulai dengan masyarakat normal yang terdiri dari pria dan wanita yang setara, sedangkan cita-cita masyarakat muslim sebagai masyarakat yang didominasi oleh kaum pria merupakan hasil tradisi-tradisi masyarakat yang berkembang secara khusus dan ditempat tertentu, bukan hasil dari aturan Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah. Menurut prinsip Islam yang mengatur penduduk non-Muslim dalam sebuah negara Islam, warha non-Muslim memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga Muslim.¹²⁶

Al-Qur'an menyatakan bahwa pliralisme ras dan etnis harus diakui, dan kelompok-kelompok ras dan etnis bermacam-macam itu harus menganal dengan baik, agar meratakan jalan atas suatu perkara gagasan dan pengalaman yang bersifat membangun, agar mereka saling bekerja dalam upaya mengembangkan kemanusiaan dan dunia dimana mereka tinggal bersama¹²⁷ seperti pada Q.S Al-Hujurat/49:13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹²⁸

¹²⁶Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*” (Jakarta: Democracy Project, 2012), h. 29.

¹²⁷Mohamed Fathi Osman, h. 30.

¹²⁸Kementrian Agama RI, *Syaamil AL-Qur'an Miracle the ReferenceQ* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), h. 46.

Ayat diatas menjelaskan menjelaskan keberagaman suku dan bangsa untuk saling mengenal satu sama lain, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dengan keturunan, kepangkatan atau kekayaan karena yang paling mulia disisi Allah SWT adalah orang-orang yang beriman kepadaNya.¹²⁹

Warga non-Muslim disebuah negara Islam harus diperlakukan dengan baik dan adil oleh pemerintah, martabat dan hak mereka harus dijamin, dan mereka pun harus dilindungi oleh hukum Islam dan penguasa negara. Dokumen yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad setelah tiba di Madinah, dimana beliau jadi menjadi pemimpin negara paling awal dalam sejarah setelah hijrahnya dari Makkah, mengindikasi komponen-komponen utama struktur sosial didalam negara-kota tersebut.

Orang-orang Yahudi dan penduduk Muslim di Madinah sama-sama bertanggung jawab untuk menopang dan mempertahankan Negara-Kota tersebut. Jikapun hubungan kaum Yahudi dan Muslimin di Madinah rusak karena alasan apapun, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya hubungan tersebut, prinsip pluralisme akan tetap sah secara moral dan hukum.¹³⁰

Memang tidak bisa dipungkiri konsep *ummah* Ali Syariati yang menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat sempurna yang dinamis memiliki banyak kesamaan dengan sistem pliralisme masyarakat yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bangsa yang hidup dengan saling menghargai dan membantu serta masyarakat yang tidak egois akan kepentingan pribadi.

Di Indoneia sendiri kehidupan yang seperti ini merupakan akhlak yang ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa. Simbol keBhinnekaan yang menjadi roh bagi penggerak perilaku masyarakat Indonesia jika fungsikan

¹²⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 305.

¹³⁰Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban* (Jakarta: Democracy Project, 2012), h. 33.

dengan baik. Tetapi jika masih banyak lapisan masyarakat yang tidak mengakui heterogenitas akan menjadi sebuah masalah bahkan konflik.¹³¹

Masalah yang terjadi di Indonesia tentang pluralisme adalah keberadaan kolompok-kelompok (agama, etnis, suku, dan ras) lebih sebatas hidup berdampingan atau koeksistensi pasif dari pada dialogis dan interaktif kemudian mereka masing-masing asyik dengan kelompok mereka sendiri. Kemudian pada setiap kelompok sibuk mempererat tali persaudaraan terhadap sesama mereka (sesama agama, etnis, suku, ras, pendapat dan lain sebagainya.) melalui kegiatan ibadah atau perayaan. dan dengan model ini, apabila terjadi perasangka antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, maka akan terus menyebar dan menguat.¹³²

Jika hal itu terjadi menurut konsep *ummah* Ali Syariati, masyarakat yang sempurna tidak akan tercipta. Menurutnya kesadaran diri istimewa manusia merupakan suatu kekuatan yang dapat membentuk masyarakat dan mencetus gerakan maupun tujuan masyarakat. Tentu saja Ali Syariati tidak lupa mengatakan bahwa keberadaan *Imam* juga sangat penting sebagai petunjuk kolektif.¹³³

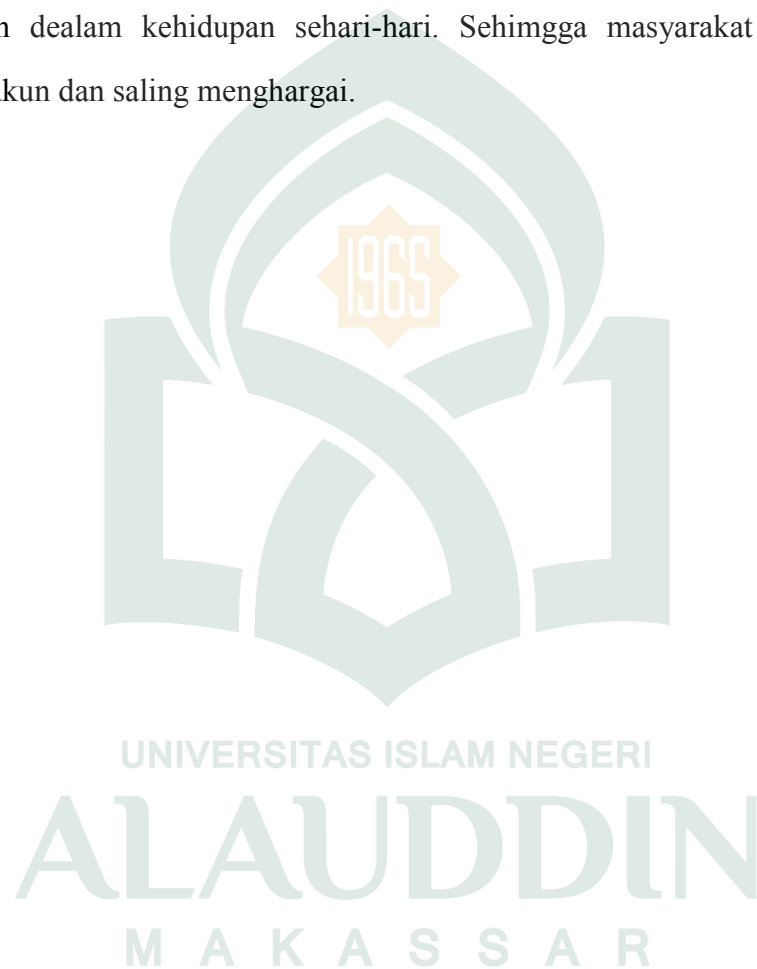
Indonesia sendiri jika dilihat dari teori Ali Syariati, dapat memenuhi syarat untuk menciptakan masyarakat yang sempurna, akan tetapi meskipun memiliki sistem pemerintahan dan konsep negara seperti yang telah dikatakan oleh Ali Syariati, namun jika simbol dan ideologi negara tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan hanya menjadi pajangan belaka, maka hanya akan menjadi omong kosong belaka dan tidak ada bedanya dengan negara-negara tiran yang lain.

¹³¹Ratna Palungan, "Membumikan Multikulturalisme Indonesia", *Jurnal Antropoli Sosial Budaya Etnovisi* II, No. 1, April 2016, h. 1.

¹³²Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban* (Jakarta: Democracy Project, 2012), h. 180

¹³³Ali Syariati, *Ideologi Kaum Intelektual; Suatu wawasan Islam* terjemahan *Free Islamic literatures* oleh Syafiq Basri (Cet. V; Bandung: Mizan, 1993), h. 60.

Faktor penentu dari perealisasiannya ini adalah individunya yang harus mampu menjadi manusia sempurna dan mau bergerak dinamis untuk mencapai kesempurnaan. ditambah lagi konflik yang ditimbulkan akibat kurangnya toleransi dan ketinggian ego suku-bangsa, ras dan agama. Bhinneka Tunggal Ika adalah solusi penyelesaian perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan rukun dan saling menghargai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam adalah agama yang selalu cocok dengan situasi kondisi zaman, bukan mengikuti zaman. Urusan politik sejak daridulu adalah urusan yang menyangkut ummat, masa pemerintahan Rasulullah ditafsirkan sebagai negara Islam pertama di dunia yang melahirkan konstitusi Piagam Madinah yang juga disebut sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Yang kemudian konstitusi ini melahirkan aturan tentang bagaimana mengatur masyarakat antara Muslim dan non-Muslim.
2. Ali Syariati menginginkan negara yang memiliki tatanan sosial yang baik, yang mampu menciptakan masyarakat ideal. Konsep *Qaum* adalah konsep yang mirip dengan konsep negara kota Athena yang kemudian konsep-konsep seperti itu disebut dengan negara kolektif. Negara yang tidak berhenti pada kekuasaan oleh kelompok kecil (minoritas) yang menjalankan pemerintahannya demi keuntungan pribadi tanpa mempedulikan nasib rakyatnya. Kemudian menciptakan masyarakat sempurna yaitu *ummah* yang menurut Ali Syariati *umma* kumpulan manusia yang para anggotanya tujuan yang sama yang satu sama lain saling bahu membahu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan berdasarkan suatu kepemimpinan yang kolektif. Istilah ini juga menghimpung beberapa konsep-konsep yaitu kebersamaan dalam arah dan tujuan, gerakan menuju arah dan tujuan tersebut, dan keharusan adanya pemimpin dan petunjuk kolektif. Konsep *Ummah* ini yang kemudian memunculkan masalah masalah yang lain.

3. Meskipun bukan negara Islam tetapi Indonesia yang mempunyai masyarakat mayoritas Islam dan menggunakan sistem pengelolaan negara berdasarkan syariat Islam. Konsep yang menjadi landasan penggerak bagi masyarakat di Indonesia memiliki kemiripan dengan konsep yang ditawarkan oleh Ali Syariati untuk menciptakan masyarakat yang sempurna. Pancasila dan konsep pluralisme sebagai implikasi dari simbol Bhinneka Tunggal Ika yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, jika diterapkan dan difungsikan secara mendalam maka akan melahirkan manusia ideal bahkan dapat menciptakan masyarakat yang sempurna. Dengan demikian mustahil jika masyarakat Indonesia apalagi khususnya umat Islam menolak Pancasila pancasila yang memiliki relasi dengan ajaran Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ali Syariati.

B. Implikasi

Setelah melakukan penelitian dengan segala kesulitan yang penulis temui, berikut penulis sampaikan beberapa implikasi bagi para pemikir-pemikir Islam dan mahasiswa yang berminat dalam topik yang sama dan ingin melakukan penelitian lanjutan.

1. Demi mengatasi kestatisan pemikiran Islam perlu diberi rangsangan-rangsangan berupa objek-objek baru dan karya-karya luar yang akan merangsang pemikirang baru
2. bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pemikiran Ali Syariati hendaknya mendalami dengan pembatasan yang lebih spesifik
3. apa yang tertera dalam penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan agar menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baru dan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle the ReferenceQ* Bandung: sygma publishing, 2010.

Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2009

Buku

Ahmad, Abidin, Zaenal, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama didunia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ahmed, Akbar S, *Rekonstruksi Sejarah Islam (di Tengan Pluralitas Agama dan Peradaban)*, Yokyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.

Azra, Azyumardi, *Islam substantif (Agar Umat Tidak Jadi Buih)* Bandung: Mizan, 2000.

-----, *Pergolakan Islam Politik: Dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Bagis, Halдар, "Ali Syari'ati: seorang Marxis yang Anti-Marxisme dan Seorang Syi'i yang Sunni" pengantar dalam Ali Syaria, Ummah dan Imamah Cet.III; Yokyakarta: Rausyanfikir Institute, 2014.

Bayumi, Mu'thi, Abdul, *Negara dalam Perspektif Islam*, Yokyakarta: Majalah Sinar Muhammadiyah, 2007.

Bhaghi, Keo, Silvano, *Negara Bukan-Bukan (Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi antara Agama dan Negara)*, Cet.I; Yokyakarta : Moya Zam Zam, 2016.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi (bidang ilmu agama islam)* Cet. I; Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998.

Black, Antony, *Pemikiran Poltik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terjemahan dari The Histori of Islamic Political though: from the prophet to the present oleh Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati Jakarta: PT.Searambi Ilmu Semesta, 2006.

Budiardjo, Miriam, *Dasara-Dasar Ilmu Politik*, Cet. X; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utara, 2014.

Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara(Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia)* Jakarta: Paramadina, 1998.

Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Gofar, Azizul, Muhammad, *Jihad Fil Pancasila*, Yokyakarta: Garudhawacana, 2016.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. VIII; Yokyakarta: Gadjja Mada University Press, 1998.

Iqbal, Muhammad, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Cet. II; Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Jurdi, Syarifuddin, *Ilmu Politik Profetik(Historis, Kontekstualitas dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politik)*, cet. 1; Yokyakarta: PT.Gramasurya, 2015.

- , *Ilmu Politik Profetik(Historitas, Kontekstualitas, dan Integrasi Keilmuan dalam Ilmu Politi)*, Cet.I; Yokyakarta: Laboratorium Ilmu Politik UINAM, 2015.
- , *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia; Konteks Ideologii dan Kepentingan*, Cet. I; Gowa: Lab. Ilmu Politik UINAM, 2015.
- Kabul, Budiyo, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik* (Cet, 1; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Karim, Syahrir, *Politik Islam I*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Oleh Bahrul Ulum, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Mufti, Muslim, *Politik Islam (Sejarah dan pemikiran)*, Cet.I; Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015.
- Muhammad, Mu'ti, Abdul, Ali, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, terjemahan Falsafah As-Siyasah bain Al-Fikrain Al-Islam wa Al-Gharbi oleh Rosihon Anwar*, Bandung: CV. Puustaka Setia, 2010.
- Muthahhari, Murthada, *Keadilan Asas Pandangan Dunia Islam Ilahi, terjemahan dari Al-'Adl Al-Ilahiy oleh Agus efendi* Cet.II; Bandung: 2009.
- Osman, Fathi, Mohamed, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Palungan, J. Sayuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dala Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam terjemahan An-Nazhariyatu as-siyasatul-Islamiyah oleh Andi Aderus banua dkk.*, Jakarta: gema Insani Press, 2001.
- Situmorang. Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islama(Siyasah Dusturiyah)* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Suhady, Idup, *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2006.
- Supriyadi, Eko, *Jejak Ali Syariati suatu Sketsa Biografi dalam Sosialisme Islam(Pemikiran Ali Syariati)*, Cet. II; Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Syariati, Ali, *Ideologi Kaum Intelektual; Suatu wawasan Islam* terj. *Free Islamic literatures* oleh Syafiq Basri, Cet. V; Bandung: Mizan, 1993.
- , *Agama vs Agama*, Cet; Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- , *Islam, Mazhab, Pemikiran dan Aksi*, Bandung: Mizan, 1992.
- , *Paradigma Kaum Tertindas; Sebuah Kajian Sosiologi* terj. *On the Sosiologo of Islam and the Visage of Muhammad*, Cet. II; Jakarta: Islami Center Al-Huda, 2001.
- , *Tugas Cedikiawan Muslim*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Gafindo, 1995
- , *Ummah dan Imamah terjemahan dari Al Ummah wa Al Imamah oleh Afif Muhammad*, Cet. III; Yokyakarta: Rausahfikir Institute, 2014.
- Taniredja, Tukiran, *Pendidikan Kewarganegaraan : Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Karya Ilmiah

- Abidin, Zainal “Dinamika Pemikiran Islam Indonesia: Sebuah Deskripsi Wacana Intelektualisme Islam di Indonesi” *Jurnal Whana Akademika* 1, No.2 April 2014.
- Adiba, Zahra, Ida, “Islam Muslim Dan Perilaku Politik(*Konsep Nation State di Dunia Islam Kontemporer*)” *Jurnal Darussalam* 9, No.4, November 2008.
- Ali, Facry, “Musyawarah dan Demokrasi sebagai Dasar Etika Politik Islam” *jurnal Politik* 3, No.3, 2008.
- Damanik, Agustina, “ Pemikiran Ali Syariati tentang *Imamah*” *Jurnal yurisprudencia* 2, No. 2, Desember 2016.
- Dewi, Ernita, “Pemikiran Filosofi Ali Syariati”, *Jurnal Substantia* 14, No.2, Oktober 2012.
- Erawati, Desi, “Interpretasi Multikulturalisme Agama dan Pendidikan”, *Jurnal Agama dan Masyarakat* XIII, No. 1, Juni 2017.
- Fani, Nasrul, Muhammad, “Pemikiran Politik Islam(studi pemikiran Abdul Rahman Wahid dan Nurcholas Majid)” Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Fani, Nasrul, Muhammad, “Pemikiran Politik Islam(studi pemikiran Abdul Rahman Wahid dan Nurcholas Majid)”, Skripsi tahun 2009
- Fuad, Fokky, “Islam dan Ideologi Pancasila, sebuah Dialektika”, *Lex Jurnalica* IX, No. 3, Desember 2018.
- Hermawan, Wawan, “Konsep Negara Menurut Al-Farabi”, *Jurnal Politik* 3, No.1, 2004.
- Izzuddin, “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah”, *Jurnal Darussalam* VII, No. 2, Desember 2008.
- Jahyadi, Sindung, “Teori kritik Jurgen Habermas: Asumsi-Asumsi Dasar menuju Metodologi Kritik Sosial”, *Jurnal Filsafat* 34, No.2, Agustus 2003.
- Lesmana, Hendra, “Bingkai Politik Islam dalam Perspektif Abdul Rasyid Moten suatu Upaya Membentuk *Ummah*”, *jurnal Lentera* III, No. 1, Maret 2017.
- Mashadi, “Pemikiran dan perjuangan Ali Syariati”, *Jurnal Al-Ulum* 11, No. 1, Juni 2011.
- Mukhlis, “Islam Dan Pemberontakan Terhadap Status Quo: Telaah Atas Pemikiran Teologi Sosial Ali Syariati”, *Jurnal ulumuna* 8, No. 2, Desember 2009.
- Nizar, Samsul, “Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” *Jurnal Demokrasi* Vol.II No.1, 2003.
- Nurjannah, Siti, ”Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Pelajar; Upaya Mencegah Aliran Anti Pancasila di Kalangan Pelajar”, *Jurnal Study agama* V, No. 1, Juni 2017.
- Rahman, Abdul,Zayad,”Konsep *Ummah* dalam Al-Qur’an: Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara-Bangsa”, *Jurnal Studi Islam* VI, No.1, April 2015.
- Rijal Mumazziq,” Konsep Negara dalam Islam(*perdebatan Rasional yang tak Kunjung Tuntas*)”, *jurnal falasifa* I, No. 2, 2010.

Subakri, Ratna, “Membumikan Multikulturalisme Indonesia”, *Jurnal Antropoli Sosial Budaya Etnovisi II*, No. 1, April 2016.

Suhaemi, El, “Pemerintah Islam menurut Ali Syariati”, *Jurnal Politik dan Agama* 5, No.2, Agustus 2012.

Tobroni, Faiq “Pemikiran Ali Syariati dalam Sosiologi (dari Teologi menuju Revolusi)”, *Jurnal Sosiologi Reflektif X*, No. 1, Oktober 2015.

Situs Internet

<https://zakigerilyawan.wordpress.com>, di akses pada tanggal 2 april 2018.

<https://www.scribd.com/doc/teori-integrasi/>, di akses pada taggal 4 april 2018.

http://www.Masyarakat_Islam.com, di akses pada 2 Mei 2018.

www.Anneahira.com/negara-Islam.htm di akses pada 30 april 2018.

WWW,Ruslanbima.wordpress.com diakses pada 4 agustus 2018.



Lampiran:

TERJEMAHAN PIAGAM MADINAH

Mukaddimah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini adalah piagam dari Madinah, Rasulullah Saw, dikalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Qurasy dan Yastrib (Madinah) yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu ummat, lain dari (komunitas) manusia lainnya.

Pasal 2

Kaum muhajirin (pendatang) dari suku Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-menbahu membayar diat diantara mereka dan mereka membawa tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara kaum mukminin

Pasal 3

Banu awf, sesuai keadaan dan sesuai (keadaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara mukminin.

Pasal 4

Banu Saidah, sesuai keadaan dan sesuai (keadaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara mukminin.

Pasal 5

Banu al-Hars, sesuai keadaan dan sesuai (keadaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara mukminin.

Pasal 6

Banu Jusyam, sesuai keadaan dan sesuai (keadaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara mukminin.

Pasal 7

Banu al-Najjar, sesuai keadaan dan sesuai (keadaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara mukminin.

Pasal 8

Banu Amr Ibnu Awf, sesuai keadaan dan sesuai (keadaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara mukminin.

Pasal 9

Banu al-Nabit, sesuai keadaan dan sesuai (keadaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara mukminin.

Pasal 10

Banu al-Awas, sesuai keadaan dan sesuai (keadaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil diantara mukminin.

Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung hutang diantara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusandan diat.

Pasal 12

Seorang mukmin tidak boleh membuat persekutuan dengan suku mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya.

Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari dan menuntut sesuatu secara dzalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan dikalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang diantara mereka.

Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir (untuk membunuh) orang beriman.

Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16

Sesungguhnya orang yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terdzalimi dan ditentang (olehnya).

Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perjanjian tan[pa ikutserta mukmin lainnya didalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kasamaan dan keadilan diantara mereka.

Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan beraqwa ada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20

Orang musyrik (yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) quraisy, dan tidak boleh campur tangan dalam melawan orang beriman.

Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali siterbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumny.

Pasal 22

Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah dihari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ; Azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad Saw.

Pasal 24

Kaum yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25

Kaum yahudi dari Bani Awf adalah satu ummat dengan mukminin. Bagi kaum yahudi agama mereka, dan bagikaum muslimin agama mereka. Juga

(kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan niri mereka sendiri, kecuali bagi yang dzalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26

Kaum yahudi banu al-Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Awf.

Pasal 27

Kaum Yahudi Banu al-Harsh diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Awf.

Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Saidah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Awf.

Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Awf.

Pasal 30

Kaum Yahudi Banu al-Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Awf.

Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa;labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Awf. Kecuali orang dzalim dan khianat. Hukumnya hanya menimpa diri dan keluarganya.

Pasal 32

Suku Jafnah dari Sa;labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa;labah)

Pasal 33

Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti yahudi Banu Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa;labah (diperlakukan) sam aseperti mereka (Banu Sa;labah).

Pasal 35

Kerabata yahudi (diluar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperan), kecuali seizin Muhammad Saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Barang siapa berbuat jahat (membunuh) maka balasan kejahatan itu akan menimpah diri dan keluarganya, kecuali jika ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiba biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38

Kaum Yahudi memikul biaya bersama Mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39

Sesungguhnya Yastrid itu haram (suci) bagi warga piagam ini.

Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti dari penjamin sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan diantara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaian

menurut (ketentuan) Allah ; Azza wa jallah dan (keputusan) Muhammad Saw. Sesuanngunya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43

Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Makkah) dan juga pendukung mereka.

Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yastrid.

Pasal 45

Apabila mereka pendukung piagam diajak berdamai dan meredakan (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus diaptuhi. Jika mereka diajak bermain seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46

Kaum Yahidi al-Aws sekutu dan diri mereka, memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (penghianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan isi piagam ini.

Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang dzalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian), aman dan orang berada di Madina aman, kecuali orang yang dzalim dan khianat. Allah adalah penjamin dari orang yang berbuat baik dan taqwa dan Muhammad Rasulullah Saw.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul **“Relasi Negara dan *Ummah* Menurut Ali Syariaty dalam Perspektif Kebangsaan Indonesia. Andi Irdyanti, Nim : 30600114072**, merupakan salah satu mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik. Lahir Balikpapan, pada tanggal 15 Mei 1996. Ia merupakan anak kedua dari tiga (3) bersaudara. Putri dari pasangan A. Arifuddin dan Nurbeda. sekarang berdomisili di Bulukumba bertempat kampung Tarampang, Desa Tambangan , Kecamatan Kajang. Riwayat pendidikan yang telah dilalui yaitu, SD Negeri 176 Tambangan, setelah lulus SD melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Kajang. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA 5 Bulukumba. Setelah lulus kemudian melanjutkan pendidikan ke tahap perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Ilmu Politik. Ia memiliki hobi *traveling*. Ia bercita-cita menjadi politikus. Maka dari itu, setelah menamatkan S1 nya, ia berencana memulai karirnya melalui partai-partai politik. Motto hidup ialah “Berusaha dan Berdoa adalah Kunci Kesuksesan ”.

